



Kata Pengantar

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjana Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini subtansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2024 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam progran dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2024 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana

strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Untuk tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan untuk mencapai 2 tujuan dan 4 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024, dengan total anggaran belanja sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, Agustus 2024 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19651210 199112 2 006

Daftar Isi

KATA PE	NGANTAR	i
DAFTAR	ISI	iii
	TABEL	iv
BAB I.	PENDAHULUAN	01
	1.1 Latar Belakang	01
	1.2 Landasan Hukum	02
	1.3 Maksud Dan Tujuan	06
	1.4 Sistimatika Penulisan	06
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
	DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	09
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai	
	Dengan Triwulan II Tahun 2024	09
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan	
	Kota Makassar	27
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	30
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	
	Kota Makassar Tahun 2024	39
	2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	53
BAB IV.	PENUTUP	61
LAMPIRA	AN	64

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	19
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	28
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 s.d Tahun 2023	34
Tabel 2.5	Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	36
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal Peubahan RKPD Tahun 2024 Kota Makassar	41
Tabel 2.7	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Makassar	49
Tabel 3.1	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024	54
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	55

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 2708/050.13/Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada pasal 343 Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun pelaksanaannya dalam berjalan adanya menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 pada triwulan II dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan permasalahan bidang ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang

terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.23.795.268.470,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.392.105.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.6.051.761.339,- (enam milyar lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 25,02 persen. Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2024 keseluruhan sebesar 61,31 persen atau capaian berkinerja rendah (51% ≤ 65%).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dengan disusun mengacu pada Surat Edaran Nomor 050.13/176/S.Edar/Bappeda/V/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA_PD) Tahun 2024 untuk Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

- Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
- 22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
- 23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
- 24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan; dan
- 25. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Maksud:

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan:

- Menyelaraskan Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja (pasal 365 ayat 2);
- 2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ke Perubahan Renja Perangkat Daerah; serta
- 3. Sebagai pedoman untuk Menyusun KUPA dan PPAS Perubahan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RECANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
 - Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan
 - Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
 - Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan Berisikan uraian mengenai:
 - Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024

Berisikan uraian mengenai:

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai alasan terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Program dan Kegiatan yang tidak mengalami perubahan serta program dan kegiatan yang mengalami perubahan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3. Rencana tindak lanjut.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketenagakerjaan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

- Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
- 2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
- 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024, adalah : Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dimana dari 16 (enam belas) usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota

Makassar sebanyak 16 (enam belas) usulan kegiatan yang terakomodir.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.7.701.751.160,- (tujuh milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) atau 31,84 persen.

Rata-rata capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 31,19 persen atau berkinerja sangat rendah

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan dan tidak terbayarnya iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan selama 2 (dua) bulan. Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	Realisasi		Tahun 2024	4
Indikator Kinerja	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.ll	% Capaian
Persentase Sarana Dan	91,92%	90,00%	56,76%	63,06%
Prasarana Aparatur Dalam				
Kondisi Baik				
Persentase Ketersediaan	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
Laporan Keuangan Dan				
Laporan Kinerja Perangkat				
Daerah				
Persentase ASN Perangkat	68,25%	90,00%	52,46%	58,29%
Daerah Yang Mendapat				
Peningkatan Kapasitas				
_	_			

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

 Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 56,76 persen.
 Dimana dari 74 unit sarana da prasarana aparatur yang tersedia sebanyak 42 unit dalam kondisi baik;

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50,00 persen dimana dari 12 laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 6 laporan; dan
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 58,29 persen. Dimana dari 61 orang ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 32 orang mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.406.337.920,- (sepuluh milyar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.928.103.090,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,76 persen.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada "tebang pilih" dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
- b. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
- d. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.

Faktor Penghambat:

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan RUP terkait metode pemilihan penyedia barang dan jasa;
- b. Tidak keluarnya Surat Penyediaan Dana (SPD) beberapa rincian belanja sehingga tidak dapat dilaksanakan; dan
- c. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan masih dalam proses pencairan keuangan.

Faktor Pendukung:

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan anggaran; dan
- b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Tindak Lanjut:

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:

a. Peningkatan kapasitas menunjang aparatur untuk penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

	Realisasi		Tahun 2024	4
Indikator Kinerja	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.ll	% Capaian
Persentase Kegiatan Yang	93,33%	96,77%	0,00%	0,00%
Dilaksanakan Yang Mengacu				
Ke Rencana Tenaga Kerja				

Rata-Rata capaian kinerja program sebesar 0,00 persen atau kategori berkinerja sangat rendah. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

a. Dari target 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0,00 persen atau dengan capaian sebesar 00,00 persen. Masih nihilnya capaian disebabkan kegiatan pada program tersebut berada triwulan III.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.570.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 21,85 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

 Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro di triwulan III.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- b. Sosialiasai Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.
- 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

	Realisasi		Tahun 2024	4
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
	2023	Ŭ	s/d Tri.II	Capaian
Persentase Tenaga Kerja	0,65%	1,03%	0,62%	60,19%
Bersertifikat Kompetensi				
Tingkat Produktivitas Tenaga	20,05%	22,00%	20,69%	94,05%
Kerja				
Jumlah Peserta Pelatihan Skill	962,00	1.190	200,00	16,81%
Traning Gratis Sektor	Orang	Orang	Orang	
Ketenagakerjaan				

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,62 persen, dimana sebanyak 2409 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 387180 orang tenaga kerja keseluruhan;
- Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 20,69 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp. 133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen; dan

 Dari target 1.190 Orang Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebanyak 200 orang.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.203.613.800,- (tiga milyar dua ratus tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.906.048.290,- (sembilan ratus enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 28,28 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Instruktur;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar; dan
- Keterlambatan proses administrasi pelaksanaan kegiatan.

Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

	Realisasi		Tahun 2024	4
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
	2023	· u. got	s/d Tri.ll	Capaian
Persentase Tenaga Kerja	59,04%	65,00%	26,33%	40,51%
Yang Ditempatkan Melalui				

Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar

Jumlah Peluang Kerja Dan	8.563	9.555	4777,00	49,99%
Peluang Bisnis Baru	Peluang	Peluang		
	Kerja	Kerja		

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 26,33 persen atau sebesar 40,51 persen dimana pencari kerja yang ditempatkan sebantak 1197 orang dari 4547 orang pencari kerja keseluruhan;
- Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 4777 peluang kerja atau sebesar 49,99 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.389.181.350,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.246.119.400,- (dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 10,30 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal; dan
- Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

5. Program Hubungan Industrial

	Realisasi		Tahun 2024	4
Indikator Kinerja	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.ll	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang	31,53%	38,50%	0,00%	0,00%
Menerapkan Tata Kelola Kerja				
Yang Layak				
Angka Sengketa Perusahaan-	4,21%	3,66%	0,00%	0,00%
Pekerja Pertahun				
Persentase Kasus Yang	62,96%	79,00%	60,44%	76,51%
Diselesaikan Dengan				
Perjanjian Bersama (PB)				

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 3,66 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun
- Dari target 79 persen kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 60,44 persen atau sebesar 76,51 persen dimana dari 91 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 55 kasus diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.8.039.200.400,- (delapan milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.588.910.380,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 19,76 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator;

- Untuk pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan verifikasi data sedang dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil; dan
- Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-E.81 berikut:

TABEL 2.1 (FORMAT T-E.81) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH **DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR** PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPD

- 1. 52,50 Persen Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas;
- 2. 22,00 Persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3. 3,66 Persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun
- 4. 88,00 Persen Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 5. 81,00 Persen Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).

	Kod	le	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangi Tahun 20		Kine Perangka dengan l	isasi Capaian erja Renstra at Daerah sanpai Renja Perangkat ih Tahun 2023	, An	get Kinerja dan ggaran Renja ıkat Daerah Tahun 2024	Anggara	jet Kinerja dan an DPA Perangkat ah Tahun 2024		1		Realisasi Kinerja	a Pada Ti	riwulan		IV	dan Aı Perangi	Capaian Kinerja nggaran Renja kat Daerah yang lievaluasi	Kine Realisas Renja I Daer	et Capaian erja dan si Anggaran Perangkat rah yang aluasi (%)	Angg: Perang	kat Daerah s/d	Tingkat Capala Kinerja dan lealisasi Anggar Renstra Perangk Daerah s/d Tahi 2024 (%)	Perangkat Daerah
					4			5		6		7		8		9		10		11		12		I/6 x 100%	14	= 5 + 11	15 =13/4 x 1005	%
					к	Rp.	к	Rp.			К	Rp.	К	Rp.	к	Rp.	K	Rp.	к	Rp.	к	Rp.	к	Rp.	к	Rp.	K Rp.	. 16
02			URUSAN WAJIB																									
02 2.0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TE	NAGA KERJA		100.978.427.000		34.688.393.372		16.399.301.944		24.187.373.870		2.444.999.946		5.256.751.214			-		- 31,84%	7.701.751.160		31,84		42.390.144.532	41	1,98
02 2.0	01		Program Penunjang Urusan	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur	90 Persen	66.549.824.200	91,92	19.713.767.361	90	10.333.799.664	90	10.406.337.920	10,81	1.865.986.166	56,76	3.062.116.924			-		- 56,76	4.928.103.090	63,06	47,36	56,76	24.641.870.451	63,06 37	7,03 Disnaker
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Kondisi Baik Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan	100 Persen		100,00		100	-	100		25,00		50,00	-					50,00		50,00	4 1	50,00		50,00	
			Kabupaten/Kota	Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100,00		100		100		25,00		50,00						50,00		50,00		50,00		50,00	
				Persentase Asn Perangkat Daerah Yang	90 Persen		88,52		90		90		24,59		52,46						52,46		58,29	1 1	52,46		58,29	
02 2.0	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67 Dokumen	1.558.610.628	21	249.000.750	13	272.589.000	12	131.310.300	1	38.300.000	-	-	-				- 1	38.300.000	8,333333	3 29,17	22	287.300.750	32,84 18	8,43 Disnaker
02 2.0	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	4	116.827.650	2	130.295.000	2	109.159.000	0	38.300.000	0	0					0	38.300.000		35,09	4	155.127.650	33,33 19	9,60 Disnaker
02 2.0	01	2.01	Perangkat Daerah 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5 Dokumen	49.643.596	2	9.382.000	1	9.651.000	1	5.377.000	0		0	0					0	(0	2	9.382.000	40,00 18	8,90 Disnaker
02 2.0			RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	5 Dokumen	46.569.705		10.447.000		8.984.000		3.899.400	<u> </u>						+		1			لسل		10.447.000		2.43 Disnaker
			03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2		1		1		U		0	Ü					U			0	2			
02 2.0	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	2	9.038.000	1	9.764.000	1	2.429.800	0	٩	0	9					0	(1 9	1 9	2	9.038.000	40,00 20	0,13 Disnaker
02 2.0	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	42.013.201	2	7.990.000	1	8.788.000	1	1.769.800	0	0	0	0					0	(0	0	2	7.990.000	40,00 19	9,02 Disnaker
02 2.0	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	5	97.785.000	4	5.286.300	1	C	0	0					1	(25	, 0	6	89.084.500	24,00 16	5,44 Disnaker
02 20	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	4	6.231.600		7.322.000	2	3.389.000										-			- 4	6.231.600	40,00 14	4,76 Disnaker
02 2.0			Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	240 Dokumen	45.333.869.754	94	13.311.095.128	_		12		2	1.549.463.597	2	2.626.404.171						4.175.867.768	50.00	0 56,99	90	17.486.962.896		8,57 Disnaker
		2.02	Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240 Dokumen	40.333.005.734	04	13.311.050.120	30	0 7.275.027.540	12	7.320.002.030	"	1.049.403.037	3	2.020.404.171			-			4.173.007.700	30,00	30,33	30	17.400.502.050	37,30	,or Distaket
02 2.0	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	305 Orang/Bulan	43.046.749.849	122	12.517.842.728	61	6.891.107.940	62	6.882.537.436	62	1.438.133.597	0	2.515.074.171					62	3.953.207.768	100,00	57,44	184	16.471.050.496	60,33 38	8,26 Disnaker
02 2.0			Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	24	466.480.000	12	240.720.000	12	265.320.000	3	66.330.000	3	66.330.000					6	132.660.000	50,00		30	599.140.000		4,78 Disnaker
02 2.0		'	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	24	288.000.000	12	144.000.000	12	144.145.200	3	36.000.000	3	36.000.000					ь	72.000.000	50,00	0 49,95	30	360.000.000	50,00 48	8,23 Disnaker
			07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400		0	12	36.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000					6	18.000.000	0,00	0,00	18	56.772.400	30,00 28	8,01 Disnaker
02 2.0	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	60 Dokumen	735.931.340	24	247.546.500	12	143.673.200	12	181.681.200	3	28.500.000	2	28.840.200			-		- 5	57.340.200	41,67	7 31,56	29	304.886.700	48,33 41	1,43 Disnaker
02 2.0	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	60 Dokumen	424.788.769	24	127.193.400	12	83.440.800	12	82.735.200	3	6.000.000	3	6.097.200					6	12.097.200	50,00	14,62	30	139.290.600	50,00 32	2,79 Disnaker
02 2.0	01	2.03	SKPD 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah	SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	311.142.572	24	120.353.100	12	60.232.400	12	98.946.000	- 3	22.500.000	3	22.743.000			+		6	45.243.000	50,00	0 45,72	30	165.596.100	50,00 53	3,22 Disnaker
			pada SKPD	pada SKPD			2.4								Ŭ						Ů				50			
02 2.0	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Dokumen	1.644.290.162	24	333.510.914	12	204.488.400	12	332.946.000	3	67.613.192	2	22.743.000			-		- 5	90.356.192	41,67	7 27,14	29	423.867.106	48,33 25	5,78 Disnaker
02 2.0	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	548 Paket	427.458.285	218	136.670.000	110	75.000.000	0	0	0	0	0	0					-		#DIV/0!	#DIV/0!	218	136.670.000	39,78 31	1,97 Disnaker
02 2.0	01	2.05	Atribut Kelengkapannya O3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kelengkapan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	312.695.296	24	119.904.600	12	60.488.400	12	98.946.000	3	22.500.000	2	22.743.000					5	45.243.000	41,67	7 45,72	29	165.147.600	48,33 52	2,81 Disnaker
02 2.0	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	780.000.000	12	76.936.314	7	69.000.000	12	234.000.000	5	45.113.192	3	0					8	45.113.192	66,67	7 19,28	20	122.049.506	28,99 15	5,65 Disnaker
02 2.0	01	2.05	10 Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	200 Orang	124.136.580	0	(0 0	0 0	0	0	0	0	0	0					0	(0,00	0,00	0	0	0,00	0,00 Disnaker
02 2.0	01	2.06	Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	35 Jenis	5.775.451.212	14	1.810.411.075	7	998.941.840	7	902.382.900	0	41.895.020	1	163.932.088			-		- 1	205.827.108	14,29	9 22,81	15	2.016.238.183	42,86 34	4,91 Disnaker
02 2.0	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	5 Paket	63.252.683	2	21.010.500	1	10.560.100	- 1	13.312.800	0	0	0	6.648.000					-	6.648.000	0,00	49,94	2	27.658.500	40,00 43	3,73 Disnaker
02 2.0	01	2.06	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Denvertigen Perelatan dan Perlangkanan	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Paket	432.256.379	9	135.548.700		68.812.200	- 5	75.977.200	-		0	16.730.000			+		+ -	16.730.000	0.00	0 22,02		152.278.700	36.00 35	5,23 Disnaker
			Kantor	yang Disediakan			9		_ *		٥		L_ "	1	_ "						الط		-,		9			
02 2.0			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.942	5	138.217.200	2	56.204.540	2	76.827.300	0	0	1	31.110.000					1	31.110.000	50,00		6	169.327.200		3,21 Disnaker
02 2.0			05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	186.007.458	4	57.050.000	1	19.465.000	2	22.665.600	_ °	0	0	0							0,00	0,00	4	57.050.000	40,00 30	0,67 Disnaker
02 2.0	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100.473.750	24	32.560.000	12	19.500.000	12	26.100.000	3	2.880.000	2	4.560.000					5	7.440.000	41,67	7 28,51	29	40.000.000	48,33 39	9,81 Disnaker
02 2.0	01	2.06		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.956.315.000	24	938.724.675	66	420.000.000	12	483.500.000	3	33.615.020	2	86.284.088					5	119.899.108	41,67	7 24,80	29	1.058.623.783	48,33 35	5,81 Disnaker
02 2.0	01	2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	24	487.300.000	12	404.400.000	12	204.000.000	3	5.400.000	2	18.600.000					5	24.000.000	41,67	7 11,76	29	511.300.000	48,33 31	1,08 Disnaker

02 2.07 01 2.07		Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang	358 Unit	4.085.244.492	184	1.696.762.251	33	216.466.750	25	356.233.000												1.696.762.251	51,40		Disnaker
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Urusan Pemerintahan Daerah	358 Unit	4.085.244.492	184	1.696.762.251	33	216.466.750	25	356.233.000		٩	1				0,00	0,00	0,00	0,00	184	1.696.762.251	51,40	41,53	Disnaker
02 2.07 01 2.07	Daerah 05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.270.400.000	78	629.324.591	3	30.000.000	16	226.000.000	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	78	629.324.591	52,00	49,54	Disnaker
02 2.07 01 2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	200 Unit	2.214.844.492	104	975.869.100	30	186.466.750	9	130.233.000	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	104	975.869.100	52,00	44,06	Disnaker
02 2.07 01 2.07	Lainnya 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit	600.000.000	2	91.568.560	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	2	91.568.560	25,00	15,26	Disnaker
02 2.07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		180 Laporan	4.004.302.422	72	1.119.697.263	36	648.055.784	36	732.942.884	9 1	06.591.857	3	150.844.485			12	257.436.342	33,33	35,12	84	1.377.133.605	46,67	34,39	Disnaker
02 2.07 01 2.08	Pemerintahan Daerah O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	938.622.398	24	370.427.489	12	180.357.200	12	158.313.600	3	34.500.000	3	36.380.700			6	70.880.700	50,00	44,77	30	441.308.189	50,00	47,02	Disnaker
02 2.07 01 2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	60 Laporan	1.713.496.365	24	446.776.128	12	328.443.084	12	337.331.684	3	53.341.857	3	50.713.785			6	104.055.642	50,00	30,85	30	550.831.770	50,00	32,15	Disnaker
02 2.07 01 2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	60 Laporan	1.352.183.660	24	302.493.646	12	139.255.500	12	237.297.600	3	18.750.000	3	63.750.000			6	82.500.000	50,00	34,77	30	384.993.646	50,00	28,47	Disnaker
02 2.07 01 2.09	Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kantor yang Disediakan Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	243 Unit	3.412.124.190	109	945.743.480	63	573.756.750	74	440.839.000	8	33.622.500	2	69.352.980			10	102.975.480	13,51	23,36	119	1.048.718.960	48,97	30,74	Disnaker
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang Dipelihara																							
02 2.07 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dina Jahatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan s dibayarkan Pajaknya	5 Unit	249.299.292	2	75.058.700	1	40.759.200	1	44.380.000	1	6.237.000	0	5.859.000			1	12.096.000	100,00	27,26	3	87.154.700	60,00	34,96	Disnaker
02 2.07 01 2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	1.724.233.340	30	336.886.850	15	306.757.550	17	254.173.000	7	27.385.500	2	45.793.980			9	73.179.480	52,94	28,79	39	410.066.330	48,75	23,78	Disnaker
02 2.07 01 2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	237.669.540	75	75.870.600	46	36.050.000	55	36.950.000	0	0	0	17.700.000			-	17.700.000	0,00	47,90	75	93.570.600	50,00	39,37	Disnaker
02 2.07 01 2.09	Lainnya 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Disnaker
02 2.07 01 2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1,050.922.019	2	457.927.330	1	190.190.000	1	105.336.000	0	0	0	0			-	-	0,00	0,00	2	457.927.330	40,00	43,57	Disnaker
	ranor dan banganan cannya	Dipolinara Direndantasi								1						Ra	ta-Rata C	apaian Kinerja (%)	57,12	47,36			57,12	37,03	
																		Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	Disnaker
02 2.07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77 Persen	636.233.000	93,33	310.226.705	93,55	231.508.000	96,77	149.040.400	0,00	13.650.000	0,00	18.920.000	0,00	-		32.570.000	0,00	21,85	-	342.796.705	0,00	53,88	Disnaker
02 2.07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5 Dokumen	636.233.000	- 1	310.226.705	1	231.508.000	1	149.040.400	0	13.650.000	0	18.920.000	0 0	0 0	0	32.570.000	0,00	21,85	1	342.796.705	20,00	53,88	Disnaker
02 2.07 02 2.01	(RTK) 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	471.897.366	2	150.175.505	1	156.666.000	1	111.507.200	0	0	0	0			-		0,00	0,00	2	150.175.505	40,00	31,82	Disnaker
02 2.07 02 2.01	Makro 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	500 Perusahaan	164.335.634	200	160.051.200	50	74.842.000	50	37.533.200	50	13.650.000	0	18.920.000			50	32.570.000	100,00	86,78	250	192.621.200	50,00	117,21	Disnaker
	Mikro				Ш											Po	to Boto C	apaian Kineria (%)	0,00	21,85			0,00	53,88	Disnaker
																140	tu-1tutu 0	Predikat Kineria	Sangat	Sangat			Sangat	Rendah	
02 2.07 03	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	1,20 Persen	20.134.599.650	0,65	7.081.595.605	0,70	3,508,303,100	1,03	3.203.613.800	0.59 2	85.835.500	0.62	620.212.790			0,62	906.048.290	Rendah 60.41	Rendah 28.28	0,62	7.987.643.895	Tinggi 51,85		Disnaker
	Produktivitas Tenaga Kerja	Kompetensi					21,50		22,00		20.69		20,69				20,69		94.06		20,69		89,97		
02 2.07 03 2.01	Palaksanaan Palatihan Rarriasarkar	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	23,00 Persen 5.690 Orang 2.800 Orang	11.068.673.234	20,05 2.084 868	3.143.539.147	1.000	2.336.805.500	1.190	1.132.128.300	60,00	_	140,00	45.246.390			200,00	45.246.390	16,81	4.00	2.284	3.188.785.537	40,14	28.81	Disnaker
02 2.07 03 2.01	Unit Kompetensi 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	2.800 Orang	10.123.339.130	868	2.952.569.072	676	2.300.590.000	240	1.123.615.300	0	0	0	43.246.390			-	43.246.390	0,00	3,85	868	2.995.815.462	31,00	29,59	Disnaker
	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	_																	·					
02 2.07 03 2.01 02 2.07 03 2.02	02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan	750 Lembaga	945.334.104	230				3	8.513.000	0	0	25	2.000.000									34,00	20,41	Disnaker
02 2.07 03 2.02		Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	400 Lambaga		160	190.970.075	50	36.215.500	50	24 912 400	20	6 000 000	90	16 966 000			25	2.000.000	50,00	23,49	255	192.970.075	65.00	E2 42	Dienakar
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	160	234.978.792	80	151.996.000	80	34.813.400	20	6.000.000	80	16.966.000	-		100	22.966.000	125,00	65,97	260	257.944.792	65,00	52,42	Disnaker
02 2.07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang	400 Lembaga 400 Lembaga		160		80		80	34.813.400 34.813.400	20	6.000.000 6.000.000	80	16.966.000 16.966.000			100 100				260 260		65,00	52,42 52,42	Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.02 02 2.07 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembag	Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produkthitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang J		492.061.325	160 160 24	234.978.792	80 80 24	151.996.000	80 80		20		80 80 6				100 100 9	22.966.000	125,00	65,97	260 260 33	257.944.792	65,00 65,00 27,50		
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembag Pelatihan Kerja 01 Penyediana Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrah	Sarena Prasarana Petathan Vokasi dan Produktivilas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Petathan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Petathan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Petathan Kerja Swasta yang Lebina Swasta yang Lebina Swasta yang Lebina Swasta yang Lebina Kerja Swasta yang Lebina Kerja Secara Terintegnal Jaminah Swasta Swasta Kerja Secara Terintegnal Lembaga Petathan Kerja Secara Terintegnal Lembaga Petathan Kerja Secara Terintegnal	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343	160 160 24	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826	80 80 24 24	151.996.000 151.996.000 183.000.400	80 80 12	34.813.400 214.774.300 214.774.300	20 3	6.000.000 45.300.000 45.300.000	80 80 6	16.966.000 44.885.500 44.885.500			100 100 9	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500	125,00 125,00 75,00 75,00	65,97 65,97 41,99 41,99	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326	65,00 27,50 27,50	52,42 32,78 32,78	Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 11 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendafaran Lembag Pelatihan Kerja 11 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Petalthan Kerja secara Terintegrasi Konsultansi Produktivitas pada	Sarana Prasarana Pelathan Vokasi dan Produktibila padia Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Obbina Jumlah Sumbaga Pelathan Kerja Swasta yang Obbina Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelathan Kerja Sacara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelathan Kerja Sacara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Petizinan Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat	400 Lembaga 120 Perizinan	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343	160 160 24 24 550	234.978.792 234.978.792 324.692.826	80 80 24 24 200	151.996.000 151.996.000 183.000.400	80 80 12 12	34.813.400 214.774.300	20 3	6.000.000 45.300.000	80 80 6 6	16.966.000 44.885.500			100 100 9 9	22.966.000 22.966.000 90.185.500	125,00 125,00 75,00	65,97 65,97 41,99	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326	65,00 27,50	52,42 32,78	Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasia oli Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasia oli Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasia Perizinan dan Pendafatran Lembaga Pelatihan Kerja Oli Peryediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Oli Pelaksanaan Krosultati Produktivitas	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivita padi Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Dikina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Dikina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Alamba Swasta yang Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jamish Sumber Daya Pertaman Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jamish Sumber Daya Pertaman Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Perusahan Kecij Yang Mendapat Konsultanan Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultanan Peningkatan Produktivitas	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343	160 160 24 24 2550	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826	80 80 24 24 200 200	151.996.000 151.996.000 183.000.400	80 80 12 12 120	34.813.400 214.774.300 214.774.300	20 3 3	6.000.000 45.300.000 45.300.000	80 80 6 6 40	16.966.000 44.885.500 44.885.500			100 100 9 9 100	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500	125,00 125,00 75,00 75,00	65,97 65,97 41,99 41,99	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326	65,00 27,50 27,50	52,42 32,78 32,78	Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastoan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastoan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastoan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Sarana Prasarana Pelathan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumiah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Obibna Unitah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Obibna Unitah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Pelathan Kerja Swasta yang Unitah Sumber Duya Peritahan Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumiah Simber Duya Perizanah Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumiah Perusahaan Kecil yang Mendapat Kerja Secara Terintegrasi Jumiah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultana Pendaktivitas Jumiah Perusahaan Kecil yang Mendapat Unitah Perusahaan Kecil yang Mendapat Unitah Debumen Hesil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingata Dezeria Irganta Leman Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingata Dezeria Irganta I	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1.250 Perusahaan 1.250 Perusahaan 5 Dokumen	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387	160 160 24 24 550 550	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800	80 80 24 24 200 200	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200		34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500	20 3 3 60 60	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000	80 80 6 6 40 40	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900			9 100 100 0	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00	52,42 32,78 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Pelatihan Kerja Persitanan Kerja Persitanan Kerja Persitanan Kerja Persitanan Kerja Konsultanal Produktivitas pada Persahan Kecil Kerja Persitanan Kecil Persitanan Kecil Persitanan Kecil Kerja Persitanan Kecil Kerja Persitanan Kecil Persitanan Persitan	Sarana Prasarana Pelathan Vokasi dan Produktivita pada Tahun 2023 Jamilah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Jamilah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Jamilah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Olahina Jamilah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelathan Kerja Sacsara Terintagrani Jamilah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelathan Kerja Sacsara Terintagrani Jamilah Delathan Kerja Vanja Perizinan Kerja Yang Mendapat Konsultana Penintagalah Kerja Yang Mendapat Konsultana Penintagalah Kerja Yang Mendapat Konsultana Penintaga Kerja Yang Mendapat Jamilah Dolumen Hasil Penjaturan Peripaturan Peripaturan Peripaturan Daya Saling Tenga Kerja di Penjaturan Pendaktivitas Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pendaktivitas Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pendaktivitas Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pendaktivitas dan Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pendaktivitas dan Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pendaktivitas dan Daya Saling Tenga Kerja di Pengakuran Pengakura	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan 1250 Perusahaan 1.250 Perusahaan	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361	160 160 24 24 550 550	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040	80 80 24 200 200	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000		34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300	20 3 3 60 60	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000	80 80 6 6 40 40	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000			0	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 0,00	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00	52,42 32,78 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pendathan Kerja Swasta Swasta Pendathan Kerja Persitana Kerja Persitana Kerja Persitana Kerja Persitana Kerja Persitana Kerja Kerja Swasta Persitana Kerja Pendathan Kerja Pedathan Kerja Swasta Pendathan Kerja Pedathan Kerja Pedathan Kerja Pedathan Kerja Pedathan Kerja Pendathan Pendathan Kerja Pendathan Kerja Pendathan Kerja Pendathan Kerja Pendathan Kerja Pendathan Kerja Pendathan	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Obbina Dangan Pelathan Kerja Swasta yang Obbina Dangan Pelathan Kerja Swasta yang Obbina Swasta Dangan Pelathan Kerja Secara Terintagrasi Jaminah Sumber Daya Pertaman Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintagrasi Jaminah Sumber Daya Pertaman Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintagrasi Jaminah Penushanan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jaminah Penushan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jaminah Penushan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Saminah Penushan Recil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Saminah Penushanah Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Saminah Saminah Penushanah Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Saminah Saminah Kecil Yangan Kerja di Jaminah Dokumen Resil Pengakuran Produktivitas Saminah Saminah Penushan Penushanah Produktivitas Saminah Saminah Penushanah Penushanah Saminah Sami	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1.250 Perusahaan 1.250 Perusahaan 5 Dokumen	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387	160 160 24 24 250 550 2	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800	80 80 24 200 200 1	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200		34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500	20 3 3 60 60	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000	80 80 6 6 40 40	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 595.368.400 apalan Kinerja (%)	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 57,09	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85 41,85	260	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00	52,42 32,78 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Swasta Swasta Pelatihan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Konsultan	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Angala Mangala Kerja Swasta yang Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jamiah Sumber Daya Pertizinan Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jamiah Sumber Daya Pertizinan Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Perunsahan Kecil yang Mendapat Konsultanan Peningkatan Produktivitas Jamiah Penusahan Kecil yang Mendapat Konsultanan Peningkatan Produktivitas Jumlah Dokuman Kecil yang Mendapat Konsultanan Peningkatan Produktivitas Jumlah Dokuman Hesil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Jamiah Pendapat Pendaktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	400 Lembaga 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1.250 Perusahaan 1.250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 5.100.816.387	160 160 24 24 550 550 2	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800	1	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200	120	34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500	20 3 3 3 60 60 - 2	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500	80 80 6 6 40 40	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900			0 - ta-Rata C	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 predikat Kinerja (%)	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 57,09 Rendah	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah	260 33 33 33 650 650 2	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 59,19 Sangat Rendah	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Swasta Swasta Pelatihan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Konsultan	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivita sada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Daga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Jawata Daga Pelathan Kerja Sawata yang Daga Jawata Daga Pelathan Kerja Sawata Yang Daga Pelathan Kerja Sawata Pelathan Kecja yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Pekusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Jumlah Dakumen Hasil Pengkuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Melatiki Mekanisma Kerja Saing Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Yang Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Yang Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Dalam Wilkayah Kota Makasara	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Persen	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387		234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800	1 1 60,00	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200	120	34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500	20 3 3 3 60 60 60 - 2 2 29,36	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500 97.160.000		16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900		Ra	0 ta-Rata C	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 595.368.400 apalan Kinerja (%)	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 0,00 57,09 Rendah	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah	260 33 33 33 650 650 2 2	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 59,19 Sangat Rendah	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.06 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembina Merja Olembina Perdifiran Lembaga Pelatihan Kerja Olembina Perdifiran Lembaga Pelatihan Kerja Olembina Perdifiran Kerja Olembina Merja Merja Merja Merja Merja Olembina Merja	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivita pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Bergang Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Bergang Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Sawata Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Sawata S	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Persen 76,00 Persen 46,240 Peluang Kerja	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387	8.563	234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 324.692.826 354.640.040 954.814.040 2.423.570.800 5.647.255.298	1 1 60,00	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200 227.345.200	120	34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500	20 20 3 3 3 3 60 60 60 - 2 2 29,36 2022,00	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500 97.160.000	2755,00	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900 148.959.400		Ra	0 ta-Rata C	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 598.368.400 598.368.400 Predikat Kinerja (%) Predikat Kinerja	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 0,00 57,09 Rendah 40,50	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85 28,28 Sangat Rendah 10,30	260 33 33 33 650 650 2 2 2 26,33	267.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 3.018.999.200 5.893.374.698	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10	52,42 32,78 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Swasta Swasta Pelatihan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Konsultan	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivita sada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Daga Pelathan Kerja Sawata yang Chibia Jawata Daga Pelathan Kerja Sawata yang Daga Jawata Daga Pelathan Kerja Sawata Yang Daga Pelathan Kerja Sawata Pelathan Kecja yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aumiah Pekusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Jumlah Dakumen Hasil Pengkuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Melatiki Mekanisma Kerja Saing Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Yang Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Yang Disenpatkan Melatiki Mekanisma Karja Dalam Wilkayah Kota Makasara	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1.250 Perusahaan 1.250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 5.100.816.387		234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800	1 1 60,00	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200	120	34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500	20 20 3 3 3 3 60 60 60 - 2 2 29,36 2022,00	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500 97.160.000		16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900		Ra	0 ta-Rata C	22.966.000 22.966.000 90.185.500 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 predikat Kinerja (%)	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 0,00 57,09 Rendah	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah	260 33 33 33 650 650 2 2	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 59,19 Sangat Rendah	Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05 02 2.07 04 2.01 02 2.07 04 2.01 02 2.07 04 2.01 04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swaston Kerja Swaston Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Peryediaan Sumber Diaya Perziriana Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Olembinaan Sumber Daya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivia pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Bergang Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Bergang Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Sawata Dan Bergang Pelathan Kerja Sawata yang Dalah Sawata Dan Bergang Pelathan Kerja Sacara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Pertanan Lembaga Pelathan Kerja Sacara Terintegrasi Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Dekumen Hesil Pregukuran Pendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Dekumen Hesil Pregukuran Produktivitas Jumlah Dekumen Hesil Progukuran Produktivitas dan Daya Sang Tenaga Kerja di Tingkat Diserah Melatik Mekenlem Liyar Andar Kerja Dalam Milayah Kota Makasara Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bieria Baru Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melatik Mekenlem Liyar Samatanan Peluang Kerja dan Peluang Bieria Baru Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Deberdayakan dan Fasilitas Luyanan Mendapakan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Prelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Remidikan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Remidikan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Remidikan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan Pelathan Melatu Birnek dan lain-lain witah Peningkatan	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Perusahaan 46,240 Peluang Kerja 15,015 Orang	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387 4.655.065.590	8.563 7.769	234,978,792 234,978,792 234,978,792 324,692,826 324,692,826 954,814,040 944,314,040 944,314,040 944,314,040 944,315,70,800 944,314,040 944,315,70,800 944,315,70,800	60,00 8.640 3.380	151.996.000 151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 183.000.400 000.156.000 227.345.200 227.345.200 1.257.346.780 621.125.080 47.127.000	120 1 1 65,00 9.555 3.713	34.813.400 214.774.300 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500 2.389.181.350 0	20 3 3 3 60 60 60 - 2 29,36 29,36	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 37.160.000 64.056.500	2755,00 651	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900 148.959.400 110.596.200		Re	26,33 4.777 1227,00	22.966.000 22.966.000 90.185.590 90.185.590 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 996.368.400 246.119.400 174.652.700 0.00	125,000 75,000 75,000 83,33 0,000 0,000 57,09 88,000 49,99 33,05	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah 10,30	260 33 33 33 650 650 2 2 26,33 4.777 8.996	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 414.678.326 1.107.086.040 1.107.086.040 3.018.939.200 3.018.939.200 4.157.127.230	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10 10,33 56,53	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17	Disnaker
22 207 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swaste Pelatihan Kerja O Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Persitanan dan Pendafiharan Lembaga Pelatihan Karja Persitanan Lembaga Pelatihan Kerja Persitanan Lembaga Pelatihan Kerja Perdaktiharis pada Persusihaan Keci Pesusihaan Keci Pelatihan Pendaktihas pada Pendaktihan Keci Pelatihan Pendaktihas Tingkat Deseria Kabupaten Kota Pengukuran Penduktihas Tingkat Deseria Kabupaten Kota Pengukuran Kempetensi dan Produktihas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Persitanan Santine Daya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Dibina Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Dibina Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Tahun 2023 Pelathan Kerja Sawata yang Dibina Jawata Pelathan Kerja Sawata yang Pelathan Kerja Sawata Pendada Kerja Sawata Sawata Pendada Kerja Sawata Kerja Yang Pendada Kerja Maniah Perunahan Kecij yang Kerdagat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aminiah Penushanan Kecij yang Kerdagat Konsultana Peningkatan Produktivitas Aminiah Penushanan Kecij yang Kerdagat Konsultana Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Dawati Naturah Penushakan Kecij yang Kerja Mangata Pengadukan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Dawati Naturah Penushakan Kerja Sawata Yangat Penushakan Kerja Sawatan Kerja Sawatan Kerja Sawatan Kerja Sawatan Penushakan Kerja Sawatan Penushakan Kerja Sawatan Kerja Sawatan Kerja Sawatan Sawatan Sawatan Kerja Sawatan	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Persen 46,260 Peluang 46,260 Peluang 15,915 Orang	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387	8.563	234.978.792 234.978.792 234.978.792 324.992.826 324.992.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800 5.647.255.298	1 1 60,00 8.640 3.380	151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 609.156.000 227.345.200 227.345.200	120	34.813.400 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500	20 3 3 3 60 60 60 - 2 29,36 29,36	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500 97.160.000	2755,00	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900 148.959.400		Ra	0 ta-Rata C 26,33 4.777 1227,00	22,966,000 22,966,000 90,185,500 90,185,500 152,282,000 152,282,000 998,368,400 998,368,400 Predikat Kinedy 246,119,400 174,652,700	125,00 125,00 75,00 75,00 83,33 83,33 0,00 57,09 Rendah 40,50 49,99	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85 28,28 Sangat Rendah 10,30	260 33 33 33 650 650 2 2 2 26,33	257.944.792 257.944.792 414.678.326 414.678.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200 5.893.374.698	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17	Disnaker
02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.03 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.04 02 2.07 03 2.05 02 2.07 03 2.05 02 2.07 04 2.01 02 2.07 04 2.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perziran dan Pendaffaran Lembag Perziran dan Pendaffaran Lembag Persiran Kerja Persiran Lembaga Pelatihan Kerja secara Tentriforgani Konsultansi Produktivitas pada Persushanan Kerja Persushanan Kerja Persushanan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Pengukuran Konputensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengukuran Kompetensi dan Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1) Penyediana Sumber Daya Pelayanan seta Kerja Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1) Penyediana Sumber Daya Pelayanan seta Kerja Pelayanan antar Kerja 2) Pelayanan antar Kerja 2) Penyelanan Simbringan Jabatan bag Persiyanan antar Kerja 2) Penyelanan Simbringan Jabatan bag Persiyanan antar Kerja	Sarana Prasarana Pelathan Vokasi dan Produktivita pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang disana Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Olaha. Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Olaha Sawata Pelathan Kerja Swasta yang Olaha Sawata Pelathan Kerja Sawata yang Pelathan Kerja Sawata yang Pelathan Kerja Sawata Yang Sawata Yang Sawata Yang Sawata Yang Sawata Yang Sawata Perusahan Kecil yang Mendapat Kongularian Peningkatan Produktivitas Aumiah Dokumen Kecil yang Mendapat Kongularian Peningkatan Produktivitas Aumiah Dokumen Kecil yang Mendapat Jamiah Dokumen Hasil Pengukuan Produktivitas Dawata Namiah Dokumen Hasil Pengukuan Produktivitas Aumiah Dokumen Hasil Pengukuan Pengukuan Pengukuan Pelathan Melatu Mekansime Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makasar Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru Jumlah Peluang Kerja Yang Ditempatkan Olberdayakan dan Fasilitas Layanan Autar Kerja Yang Mendapakan Pelathan Melatuk Binnek dan lain-lanuk Peringkatan Pelathan Melatuk Binnek dan lain-lanuk Peringkatan Kompetera Mendapakan Pelathan Melatuk Barupanan Akad dan Akil. Jumlah Perusa Kerja yang Mendapakan	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Perusahaan 46,240 Peluang Kerja 15,015 Orang	492.061.325 492.061.325 1.265.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387 4.655.065.590	8.563 7.769	234,978,792 234,978,792 234,978,702 324,692,826 324,692,826 954,814,040 944,314,040 944,314,040 944,315,70,800 2,423,570,800 3,982,474,536 764000	60,00 8.640 3.380	151.996.000 151.996.000 151.996.000 183.000.400 183.000.400 183.000.400 000.156.000 227.345.200 227.345.200 1.257.346.780 621.125.080 47.127.000	120 1 1 65,00 9.555 3.713	34.813.400 214.774.300 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500 2.389.181.350 0	20 3 3 3 60 60 60 - 2 29,36 29,36	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 37.160.000 64.056.500	2755,00 651	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900 148.959.400 110.596.200		Ra	26,33 4.777 1227,00	22.966.000 22.966.000 90.185.590 90.185.590 90.185.500 152.282.000 152.282.000 595.368.400 996.368.400 246.119.400 174.652.700 0.00	125,000 75,000 75,000 83,33 0,000 0,000 57,09 88,000 49,99 33,05	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah 10,30	260 33 33 33 650 650 2 2 26,33 4.777 8.996	257.944.792 257.944.792 414.878.326 414.878.326 414.678.326 1.107.086.040 1.107.086.040 3.018.939.200 3.018.939.200 4.157.127.230	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10 10,33 56,53	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17	Disnaker
22 267 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Olembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Pergetahan Kerja Perdedakritas pada Perusihaan Kocil Pelatihan Kocil Pelatihan Kocil Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Pengukuran Produktivitas Tingkat Derah Kabupaten Kocil Pengukuran Kropitensi dan Produktivitas Tingkat Derah Kabupaten Kocil Pengukuran Kropitensi dan Produktivitas Tengga Kerja Produktivitas Tengga Kerja Produktivitas Tengga Kerja Pengukuran Serja Kerja Pengukuran Serja Kerja Pengukuran Serja Kerja Pengukuran Serja Serja Pengukuran Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Olembin Serja Pengukuran Antarkerja di Daerah Pengukuran Antarkerja di Daerah Pengukuran Pengukura	Sarana Prasarana Pelathan Vokasi dan Produktivia pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Berga Berga Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Dan Berga Berga Pelathan Kerja Sawata yang Obbina Sawata Dan Berga Berga Pelathan Kerja Sawata yang Dan Jawata Dan Berga Pelathan Kerja Sawata yang Pelathan Kerja Sawata Pendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Penusahan Kecil yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Jumlah Dawatan Hesilah Mekanisen Layanan Produktivitas Jumlah Dawatan Hesilah Mekanisen Layanan Anlair Kerja Dalam Wilayah Kota Makasara Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan Mendapatkan Pelathan Mekalu Dimenak dan Isalitasa Luyanan Andar Kenja Dalam Mendapatkan Pelathan Mekalu Dimenak dan Isalitasa Luyanan Andar Kenja Dalam Mendapatkan Pelathan Mekalu Dimenak dan Isalitasa Luyanan Andar Kenja yang Ditempatkan Mekalu Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelathan Mekalus Dimek dan Isaliman Layaman Andar Mendapatkan Pelathan Mekalus Dimek dan Isaliman Layaman Andar Kenja Dalaminan Perusah Kerja yang Mendapatkan Pelathan Mekalus Danishi Perusah Kerja yang Mendapatkan Pelathan Mekalus Dimek dan Isaliman Layaman Andar Kenja Dalaminan Perusah Kenja yang Mendapatkan Pelathan Mekalus Danishi Perusah Kenja yang Mendapatkan Pelathan Mekalus Danishi Perusah Kenja Dalaminan Pendapatkan Pelat	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1,250 Perusahaan 1,250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 75,00 Persen 75,00 Persen 16,240 Petuang Kerja 15,915 Grang 120 Grang	492.061.325 492.061.325 1.266.515.343 1.266.515.343 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387 9.042.923.150 140.000.000	8.563 7.769 0 6.857	234.978.792 234.978.792 234.978.792 324.692.826 324.692.826 324.692.826 954.814.040 954.814.040 2.423.570.800 5.647.255.298 3.982.474.530 734000 733.250.474	60,00 8.640 3.380	151.996.000 151.996.000 151.996.000 163.000.4000 163.0	120 1 1 65,00 9.555 3.713	34.813.400 214.774.300 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500 2.389.181.350 0	20 3 3 3 60 60 - 2 29,36 576 0	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 37.160.000 64.056.500	2755,00 651	16.966.000 44.885.500 44.885.500 129.782.000 129.782.000 383.332.900 148.959.400 110.596.200		Ra	26,33 4.777 1227,00 0.00	22,966,000 22,966,000 23,966,000 90,185,500 90,185,500 152,282,000	125,000 75,000 75,000 83,33 0,000 0,000 57,09 Rendah 40,50 33,05 0,000	65,97 65,97 41,99 41,99 38,14 38,14 41,85 41,85 28,28 Sangat Rendah 10,30	260 33 33 33 650 650 2 2 26,33 4.777 8.996	257.944.792 257.944.792 257.944.792 414.676.326 414.676.326 1.107.096.040 1.107.096.040 3.018.939.200 5.893.374.698 4.157.127.230 794000,00	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10 10,33 56,53 0,00	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17	Disnaker Disnaker
02 2.07 03 2.03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta Swasta Pelatihan Kerja Swasta Sw	Saman Prasaman Pelathan Vokasi dan Produktivita pada Tahun 2023 Jumlah Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Ditina Ditina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Ditina Lembaga Pelathan Kerja Swasta yang Ditina Swasta Pelathan Kerja Swasta yang Ditina Swasta Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jamiah Sumber Daya Pertarian Lembaga Pelathan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Perusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Produktivitas Daniah Penusahan Kecij yang Mendapat Konsultana Peningkatan Penduktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Penduktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Melatui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makasasr Jumlah Pelathan Kerja Penusahan Jumlah SOM Pelayanan antar Kerja Yang Ditempatkan Melatui Mendapatkan Pelathan Melatui Biminek dan lain-lain-tak Peningkatan Kompidersan Jumlah Folkapa Kerja yang Mendapatkan Pelatingan Jamah Percar Kerja yang Mendapatkan Pelatogan yang kembagan alahan Pencar Kerja yang Mendapatkan Pencar Kerja yang	400 Lembags 120 Perizinan 120 Perizinan 120 Perizinan 1.250 Perusahaan 1.250 Perusahaan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 46.260 Perusahaan 1.250	492.061.325 402.061.325 402.061.325 1.266.515.343 1.265.515.343 2.207.533.361 5.100.816.387 5.100.816.387 4.659.065.590 140.000.000 1.581.271.666 211.723.027	8.563 7.769 0 6.857	234.978.792 234.978.792 234.978.792 334.692.826 324.692.826 324.692.826 954.814.040 2.423.570.800 5.647.255.298 3.862.474.530 794000 733.260.474	60,00 8.640 3.380	151.996.000 151.996.000 151.996.000 153.000.4000 153.000.4000 153.000.4000 153.0000.4000 153.0000.4000 153.0000.4000 153.0000.400000000000	120 1 1 1 65,00 9.555 3.713 0	34.813.400 214.774.300 214.774.300 214.774.300 399.285.300 399.285.300 1.422.612.500 1.422.612.500 2.389.181.350 0 144.946.400	20 3 3 3 60 60 - 2 29,36 576 0	6.000.000 45.300.000 45.300.000 22.500.000 22.500.000 112.035.500 97.160.000 0 14.556.500 0	2755,00 651	16,966,000 44,885,500 44,885,500 128,782,000 129,782,000 383,332,900 148,959,400 0 110,596,200 0		Re	26,33 4.777 1227,00 0.00	22,966,000 22,966,000 23,966,000 90,185,500 90,185,500 152,282,000 152,282,000 152,282,000 152,282,000 152,388,400 152,388,400 152,388,400 174,682,700 174,682,700 0,00	125,00 125,00 75,00 83,33 83,33 0,00 0,00 57,09 Rendah 40,50 0,00 34,20 0,00	65,97 65,97 41,99 41,99 41,95 38,14 41,85 28,28 28,28 10,00 10,67 0,00	260 33 33 33 650 650 2 2 26,33 4.777 8.996	257.944.792 257.944.792 257.944.792 414.678.326 414.678.326 1.107.996.040 1.107.996.040 3.018.939.200 5.893.374.696 794000.00 790.418.174 63.533.940	65,00 27,50 27,50 52,00 52,00 40,00 40,00 40,00 60,65 Rendah 35,10 10,33 56,53 0,00 57,53	52,42 32,78 32,78 50,15 50,15 50,15 59,19 59,19 39,67 Sangat Rendah 65,17 48,09 30,01	Disnaker

2.07	04 2	.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	310.550.466	12	122.122.544	6	84.638.600	6	41.499.200	1	9.000.000	2	9.097.200			-	3	18.097.200	50,00	43,61	15	140.219.744	50,00	45,15	Disnake
			(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
			01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	227.504.964		84.176.336	ь	42.453.600	6	41.499.200	1	9.000.000	2	9.097.200				3	18.097.200	50,00	43,61	15	102.273.536	50,00		Disnak
			02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502		37.946.208	4	42.185.000	0	0	0	0	0	0				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	37.946.208	40,00	45,69	Disnak
2.07	04 2	.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	3.031.203.308	11.157	1.302.009.500	4.000	453.906.200	8.000	489.322.000	1.962	19.500.000	2.585	18.202.500			1	4547,00	37.702.500	56,84	7,71	15.704	1.339.712.000	39,26	44,20	Disnak
2.07	04 2	.03	01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	316.496.699	24	89.598.700	12	42.767.600	12	60.328.000	3	10.500.000	2	9.105.300				5,00	19.605.300	41,67	32,50	29	109.204.000	48,33	34,50	Disnal
2.07	04 2	.03	02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	11.157	263.380.000	4.000	46.109.600	8.000	43.766.800	1962	9.000.000	2585	9.097.200			4	4547,00	18.097.200	56,84	41,35	15704	281.477.200	39,26	28,13	Disnal
			03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5.000 Orang	1.714.006.714	2.581	949.030.800	1.000	365.029.000	500	385.227.200	0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00	2581	949.030.800	51,62	55,37	Disna
2.07	04 2	.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	1.200 Orang	1.043.113.786	210	240.648.724	120	97.676.900	40	222.076.000		4.603.500		11.063.500			0	0	15.667.000	0,00	7,05	210	256.315.724	17,50	24,57	Disna
2.07	04 2	.04	01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	800 Orang	559.970.481	150	60.890.440	100	25.310.000	0	0	0	0	0	0					-	#DIV/0!	#DIV/0!	150	60.890.440	18,75	10,87	Disna
2.07	04 2	.04	03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	.483.143.304	60	179.758.284	20	72.366.900	40	222.076.000	0	4.603.500	0	11.063.500				-	15.667.000	0,00	7,05	60	195.425.284	15,00	40,45	Disna
									'										Rata	-Rata Cap	aian Kinerja (%)	45,25	10,30			22,72	65,17	
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disna
2.07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	51,01 Persen	4.614.847.000	33,69	1.935.548.403	33,69	1.068.344.400	38,50	8.039.200.400	0,00	182.368.280	0,00	1.406.542.100				0,00	1.588.910.380	0,00	19,76	33,69	3.524.458.783	66,05	76,37	Disna
				Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	2,50 Persen		4,21		4,14		3,66		0,00		0,00					0,00		0,00		4,14		34,40		
				Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,00 Persen		62,62		74,00		79,00		35,71		60,44					35,71		45,21		35,71		40,13		
2.07	05 2	.01	dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	525 Perusahaan	1.332.331.879	231	597.757.989	105	43.695.700	105	51.223.300	14	12.103.100	,	2.072.100		-		14	14.175.200	13,33	27,67	245	611.933.189	46,67	45,93	Disn
2.07	05 2	.01	Daerah Kabupaten/Kota O1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	i Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	221	56.375.000	100	1.708.000	100	1.024.800	14	0	0	0				14	-	14,00	0,00	235	56.375.000	47,00	19,90	Disr
2.07	05 2	.01	02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	10	53.534.400	5	1.280.000	5	868.700	0	0	0	0				-		0,00	0,00	10	53.534.400	40,00	39,98	Disn
2.07			03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315		487.848.589	12	40.707.700	12	49.329.800	3	12.103.100	3	2.072.100				6	14.175.200	50,00	28,74	30	502.023.789	50,00	54,85	Disn
2.07	05 2	.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	387	1.337.790.414	260	1.024.648.700	260	7.987.977.100	48	170.265.180	61	1.404.470.000				109	1.574.735.180	41,92	19,71	496	2.912.525.594	39,68	88,73	Disn
2.07	05 2	.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250 Perkara	622.236.026	93	277.557.800	60	127.582.000	60	77.126.300	17	0	12	66.132.500				29	66.132.500	48,33	85,75	122	343.690.300	48,80	55,23	Disn
2.07	05 2	.02	Penyelesalan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1.000 Perkara	1.087.010.870	294	303.300.844	200	174.318.400	200	198.663.600	31	55.808.491	49	22.767.300				80	78.575.791	40,00	39,55	374	381.876.635	37,40	35,13	Disr
2.07	05 2	.02	03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Aflijasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909	9	44.798.700	12	21.966.000	12	9.861.200	0	0	0	0				-	-	0,00	0,00	9	44.798.700	15,00	26,92	Disr
2.07	05 2	.02	04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	5	350.363.170	2	336.630.800	2	250.299.300	0	57.253.648	1	56.454.000				1	113.707.648	50,00	45,43	6	464.070.818	10,00	43,30	Disn
2.07	05 2	.02	05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	250	361.769.900	100	364.151.500	35.782	7.452.026.700	0	57.203.041	34000	1.259.116.200				34.000	1.316.319.241	95,02	17,66	34250	1.678.089.141	<i>*************************************</i>	500,87	Disn
			Kesejahteraan Pekerja											l					Rata	-Rata Cap	aian Kinerja (%)	15,07	19,76			46,86	76,37	Disr
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dist
														TOTA	L RATA-RA	TA CAPAIAN KIN	ERJA DA	N ANGGARAN DARI SELURUH F	PROGRAM (PROG	RAM 1 s.d	. PROGRAM)	34,90	31,84			37,47	41,98	Disn
																		KAT KINERJA DARI SELURUH F				Sangat	Sangat			Rendah	Sangat	Disn

Untuk capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021–2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2024 (merupakan tahun ketiga periode RENSTRA) rata-rata capaian kinerja sebesar 58,51 persen hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang indikator kinerja program secara langsung belum waktunya dilaksanakan.

Adapun perkiraan realisasi capaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Tingkat capaian realisasi target kinerja sebesar 83,42 persen;
- 2. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 58,31 persen;
- 3. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 3 program, yang telah memenuhi target sebanyak 2 program dan melebihi target sebanyak 0 program;
- 4. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 19 kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan; serta
- 5. Realisasi sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 59 sub kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 sub kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-C.29 berikut

TABEL 2.2 (FORMAT T-C.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

							tan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Ke			si Target Kinerja	Tai	rget Kinerja dan An	a dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023					ogram dan Kegiatan		aan Realisasi Capaia rangkat Daerah s/d t		
	K	Code			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)			Keluar	Program dan an Kegiatan s/d an tahun 2022		enja Perangkat h tahun 2023		si Renja Perangkat rah tahun 2023	Tingkat Re		(Renja F	Perangkat Daerah ahun 2024)	dan Ke berja	Capaian Program giatan s/d tahun lan (tahun 2024)	Realisa Rens	: Capaian si Target stra (%)
					2	3	4			5		6		7	8 = 7/6			9		10 = 9 +7		4 x 100%
_		1					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
02					URUSAN WAJIB																	
02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TE	NAGA KERJA		100.978.427.000		17.696.143.073		18.266.855.572		16.992.250.299		16,83%		24.187.373.870		58.875.767.242		58,31
02	2.07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90 Persen	66.549.824.200	91,92	9.964.018.995	90,00	10.714.718.462	91,92	9.749.748.366	102,13	14,65	90	10.406.337.920	90	30.120.105.281	100,00	45,26
						Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		100,00	
						Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Persen		88,52		90,00		88,52		98,36		90		90		100,00	
02	2.07	01 2	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67 Dokumen	1.558.610.628	13	182.407.750	8	70.640.000	8	66.593.000	11,94	4,27	12	131.310.300	33,00	380.311.050	49,25	24,40
02	2.07	01 2	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	2	57.827.650	2	61.736.000	2	59.000.000	16,67	7,46	2	109.159.000	6,00	225.986.650	50,00	28,56
02	2 07		2.01		Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5 Dokumen	49.643.596	1	7.510.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20,00	3,77	1	5.377.000	3,00	14.759.000	60,00	
		01 2			RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	5 Dokumen	46.569.705	1	8.575.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20.00	4,02	1	3.899.400	3.00	14.346.400	60.00	
02	2.01	01 2	2.01		Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	40.309.705	'	6.373.000	'	2.170.000	'	1.672.000	20,00	4,02	'	3.099.400	3,00	14.340.400	00,00	30,81
02	2.07	01 2	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	1	6.808.000	1	2.636.000	1	2.230.000	20,00	4,97	1	2.429.800	3,00	11.467.800	60,00	25,55
02	2.07	01 2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	42.013.201	1	6.560.000	1	1.724.000	1	1.430.000	20,00	3,40	1	1.769.800	3,00	9.759.800	60,00	23,23
02	2.07	01 2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	-	-	-	-	-	-	4	5.286.300	9,00	94.370.800	36,00	17,41
					Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	2	6.042.600	2	192.000	2	189.000	20,00	0,45	2	3.389.000	6,00	9.620.600	60,00	22,78
02	2.07	01 2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240 Dokumen	45.333.869.754	48	6.579.946.435	36	7.367.917.235	36	6.731.148.693	15,00	14,85	12	7.328.002.636	96,00	20.639.097.764	40,00	45,53
		01 2			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305 Orang/Bulan	43.046.749.849	61	6.167.814.035	61	6.983.197.235	61	6.350.028.693	20,00	14,75	62	6.882.537.436	184,00	19.400.380.164	60,33	45,07
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	12	229.360.000	12	240.720.000	12	237.120.000	20,00	17,72	12	265.320.000	36,00	731.800.000	60,00	
02	2.07	01 2	2.02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	20,00	19,29	12	144.145.200	36,00	432.145.200	60,00	57,89
02	2.07	01 2	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400	0	0	-	-	-	-	12	36.000.000	24,00	74.772.400	40,00	36,89
02	2.07	01 2	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	60 Dokumen	735.931.340	12	124.111.680	12	142.938.800	12	123.434.820	20,00	16,77	12	181.681.200	36,00	429.227.700	60,00	58,32
02	2.07	01 2	2.03		pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	60 Dokumen	424.788.769	12	63.616.752	12	82.951.200	12	63.576.648	20,00	14,97	12	82.735.200	36,00	209.928.600	60,00	49,42
02	2.07	01 2	2.03	06	SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah	SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	311.142.572	12	60.494.928	12	59.987.600	12	59.858.172	20,00	19,24	12	98.946.000	36,00	219.299.100	60,00	70,48
02	2.07				pada SKPD Administrasi Kepegawaian	pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	60 Dokumen	1.644.290.162	12	142.252.428	12	210.243.600	12	191.258.486	20,00	11,63	12	332.946.000	36,00	666.456.914	60,00	
02	2.07	01 2	2.05	02	Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	548 Paket	427.458.285	108	63.070.000	110	75.000.000	110	73.600.000	20,07	17,22	-	-	218,00	136.670.000	39,78	
02	2.07	01 2	2.05		Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kelengkapan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	60 Dokumen	312.695.296	12	60.550.428	12	60.243.600	12	59.354.172	20,00	18,98	12	98.946.000	36,00	218.850.600	60,00	
02					Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69 Orang	780.000.000	2	18.632.000	10	75.000.000	10	58.304.314	14,49	7,47	10	234.000.000	22,00	310.936.314	31,88	
	2.07				Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	200 Orang	124.136.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	. ,) 0
	2.07				Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang	35 Jenis	5.775.451.212	7	702.242.712	7	1.147.232.780	7	1.108.168.363	20,00	19,19	7	902.382.900	21,00	2.712.793.975	60,00	46,97
02	2.07	01 2	2.06	01	Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	63.252.683	1	10.415.000	1	12.687.100	1	10.595.500	20,00	16,75	1	13.312.800	3,00	34.323.300	60,00	54,26
02	2 07	01 3	2 06			Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Paket	432.256.379	4	68.242.000	5	78.695.300	5	67.306.700	20,00	15.57	5	75.977.200	14 00	211.525.900	56,00	48,94
-			00		Kantor	yang Disediakan	20 1 0.00	-02.200.519		35.2-2.000	3	70.000.000	J	57.555.700	20,00	10,01		7 0.077.200	1-1,50	211.020.000	55,00	10,04

02 2.	07 0	11 2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.942	2	67.138.100	3	77.430.380	3	71.079.100	20,00	18,14	2	76.827.300	7,00	215.044.500	46,67	54,87
02 2.	07 0°	1 2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	186.007.458	2	22.330.000	2	39.620.000	2	34.720.000	20,00	18,67	2	22.665.600	6,00	79.715.600	60,00	42,86
02 2.	07 0	1 2.06	06	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	60 Dokumen	100.473.750	12	16.320.000	12	19.500.000	12	16.240.000	20,00	16,16	12	26.100.000	36,00	58.660.000	60,00	58,38
02 2.		1 2.06	00	Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	60 Laporan	2.956.315.000	12	469.397.612	12	474.500.000	12	469.327.063	20,00	15,88	12	483.500.000	36,00	1.422.224.675	60,00	48,11
				Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD																
02 2.	07 0°	1 2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	12	48.400.000	12	444.800.000	12	438.900.000	20,00	26,68	12	204.000.000	36,00	691.300.000	60,00	42,02
02 2.	07 01	1 2.07		SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang	358 Unit	4.085.244.492	120	1.398.284.901	64	354.249.750	64	298.477.350	17,88	7,31	25	356.233.000	209,00	2.052.995.251	58,38	50,25
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																
02 2.		1 2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.270.400.000	49	457.774.591	29	178.872.000	29	171.550.000	19,33	13,50	16	226.000.000	94,00	855.324.591	62,67	67,33
02 2.	07 0	1 2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.214.844.492	69	848.941.750	35	175.377.750	35	126.927.350	17,50	5,73	9	130.233.000	113,00	1.106.102.100	56,50	49,94
		1 2.07		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit	600.000.000	2	91.568.560	0	0	-	-	-	-	0	0	2,00	91.568.560	25,00	15,26
02 2.	07 01	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Laporan	4.004.302.422	72	453.986.009	36	751.591.447	36	665.711.254	20,00	16,62	36	732.942.884	144,00	1.852.640.147	80,00	46,27
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	938.622.398	12	178.989.384	12	200.172.000	12	191.438.105	20,00	20,40	12	158.313.600	36,00	528.741.089	60,00	56,33
02 2.	07 0	1 2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.713.496.365	12	246.874.625	12	252.963.947	12	199.901.503	20,00	11,67	12	337.331.684	36,00	784.107.812	60,00	45,76
02 2.	07 0	1 2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	60 Laporan	1.352.183.660	12	28.122.000	12	298.455.500	12	274.371.646	20,00	20,29	12	237.297.600	36,00	539.791.246	60,00	39,92
02 2.	07 01	1 2.09		Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kantor yang Disediakan Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	243 Unit	3.412.124.190	46	380.787.080	63	669.904.850	63	564.956.400	25,93	16,56	74	440.839.000	183,00	1.386.582.480	75,31	40,64
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang Dipelihara																
02 2.	07 0	1 2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	249.299.292	1	32.024.600	1	47.411.250	1	43.034.100	20,00	17,26	1	44.380.000	3,00	119.438.700	60,00	47,91
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas																	
02 2.	07 0	1 2.09	02	Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80 Unit	1.724.233.340	15	126.690.150	15	286.142.600	15	210.196.700	18,75	12,19	17	254.173.000	47,00	591.059.850	58,75	34,28
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
00 0	07 04	4 0.00	00	Lapangan	·	450 11-3	227 222 542		24 422 422	40	40.050.000	46	44 447 500	20.07	47.44	55	20 050 000	420.00	440,000,000	00.07	47.47
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	237.669.540	29	34.423.100	46	46.050.000	46	41.447.500	30,67	17,44	55	36.950.000	130,00	112.820.600	86,67	47,47
02 2				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit 5 Unit	150.000.000	0	187.649.230	0	290 301 000	0	270.278.100	20,00	25,72	0	105.336.000	3,00	563.263.330	60,00	53,60
			03	Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi		,	<u>'</u>						·						· ·	
02 2	. .	_			Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77 Persen	636.233.000	93,33	224.904.165	93,55	108.599.000	93,33	85,322.540 85,322.540	96,45	13,41	96,77	149,040.400	96,77	459,267.105	100,00	72,19
-		2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		5 Dokumen		1		1	108.599.000	1	5	20,00	13,41	1	149.040.400	3,00	459.267.105	60,00	72,19
02 2.			01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	* 471.897.366	1	125.714.965	1	41.857.000	1	24.460.540	20,00	5,18	1	111.507.200	3,00	261.682.705	60,00	55,45
02 2.	07 02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	500 Perusahaan	164.335.634	150	99.189.200	50	66.742.000	50	. 60.862.000	10,00	37,04	50	37.533.200	250,00	197.584.400	50,00	120,23
02 2.	07 03	13		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,20 Persen	20.134.599.650	0,53	3.307.805.025	0,70	3.875.738.700	0,65	3.773.790.580	53,76	18,74	1,03	3.203.613.800	1,03	10.285.209.405	85,83	51,08
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,00 Persen		20,05		21,50		20,05		87,17		22,00		22,00		95,65	1
					Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	5.690 Orang		1.122		1.000		962		16,91		1.190		3.274,00		57,54	
02 2.	07 03	3 2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	11.068.673.234	532	1.362.066.799	336	1.841.958.500	336	1.781.472.348	12,00	16,09	240	1.132.128.300	1.108,00	4.275.667.447	39,57	38,63
02 2	07 01	3 201	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	2.800 Orang	10.123.339.130	532	1.194.177.349	336	1.817.743.000	336	1.758.391.723	12,00	17,37	240	1.123.615.300	1.108,00	4.076.184.372	39,57	40,27
~ ~	- 0		"	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023		10.120.003.100	552		555	1.011.140.000	550	1.700.001.720	12,30	,51		1. 120.010.000	100,00	4.070.104.072	55,57	10,21
02 2.	07 03	3 2.01	02	Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka	750 Lembaga	945.334.104	180	167.889.450	50	24.215.500	50	23.080.625	6,67	2,44	50	8.513.000	280,00	199.483.075	37,33	21,10
				Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan																
				Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Produktivitas pada Tahun 2023			- 00	****		100 000 000		100 000 000								L
02 2.		3 2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	129.546.000	80	123.260.000	20,00	25,05	80	34.813.400	240,00	269.792.192	60,00	54,83
02 2.	07 03	3 2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	129.546.000	80	123.260.000	20,00	25,05	80	34.813.400	240,00	269.792.192	60,00	54,83
02 2.	07 03	3 2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	12	142.671.834	24	198.947.600	24	182.020.992	20	14,38	12	214.774.300	48,00	539.467.126	40,00	42,63
02 2.	07 03	3 2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	12	142.671.834	24	198.947.600	24	182.020.992	20	14,38	12	214.774.300	48,00	539.467.126	40,00	42,63
02 2.	07 03	3 2.04		Terintegrasi Konsultansi Produktivitas pada	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	300	511.200.000	300	503.748.240	24,00	22,82	90	399.285.300	640,00	1.354.099.340	51,20	61,34
02 2.	07 03	3 2.04	01	Perusahaan Kecil Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas	Konsultansi Peningkatan Produktivitas Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	300	511.200.000	300	503.748.240	24,00	22,82	90	399.285.300	640,00	1.354.099.340	51,20	61,34
		3 2.05		kepada Perusahaan Kecil	Konsultansi Peningkatan Produktivitas		5.100.816.387	250	1,240,281,800	300		300				30					
02 2.	07 03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di	5 Dokumen	5.100.616.387	1	1.240.261.800		1.194.086.600	1	1.183.289.000	20,00	23,20	1	1.422.612.500	3,00	3.846.183.300	60,00	75,40
02 2.	07 03	3 2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan	Tingkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	1.194.086.600	1	1.183.289.000	20,00	23,20	1	1.422.612.500	3,00	3.846.183.300	60,00	75,40
1 1	1	- 1	1	Produktivitas Tenaga Kerja	dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1 1		1			1	1		ı					Í

02	2.07	04			Program Penempatan Tenaga Keria	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	75.00 Persen	9.042.923.150	53,46	3.050.042.646	60,00	2.718.381.410	59,04	2.597.212.652	78,72	28.72	65,00	2.389.181.350	65,00	8.036.436.648	86.67	88.87
02	2.07	04			rrogram renempatan renaga kerja	Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam	75,00 1 613611	3.042.323.130	33,40	3.030.042.040	00,00	2.710.301.410	33,04	2.557.212.052	70,72	20,72	03,00	2.303.101.330	03,00	0.030.430.040	00,07	00,07
						Wilayah Kota Makassar Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	46.240 Peluang		8,483		8,640		8.563		18,52	-	9,555		26.601		57,53	
						Julian Feldang Reija Dan Feldang Disms Dard	Kerja															
02	2.07	04 2	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	15.915 Orang	4.658.055.590	3.864	1.985.005.722	3.948	2.078.249.310	3.905	1.997.468.808	24,54	42,88	3.713	1.636.284.150	*********	5.618.758.680	72,15	120,62
02	2.07	04 2	2.01		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain	120 Orang	140.000.000	0	0	30	1.371.000	0	794000	(0,5671429	-	-		794.000	-	0,57
02	2.07	04 2	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui	14.000 Orang	1.581.271.686	3.400	646.716.626	3.500	95.914.300	3.457	86.543.848	24,69	5,47	3500	144.946.400	************	878.206.874	73,98	55,54
02	2.07	04 2	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bag Pencari Kerja	Layanan AKAD dan AKL i Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	211.723.027	100	40.762.940	100	25.269.000	100	22.771.000	20,00	10,76	0	-	200,00	63.533.940	40,00	30,01
02	2.07	04 2	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	500 Orang	579.577.120	115	142.566.676	100	69.828.200	100	63.246.460	20,00	10,91	30	235.120.000	245,00	440.933.136	49,00	76,08
02	2.07	04 2	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	915 Orang	2.145.483.756	249	1.154.959.480	248	1.885.866.810	248	1.824.113.500	27,10	85,02	183	1.256.217.750	680,00	4.235.290.730	74,32	197,40
02	2.07	04 2	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	310.550.466	6	56.786.096	6	69.875.400	6	65.336.448	20,00	21,04	6	41.499.200	18,00	163.621.744	60,00	52,69
		04 2		01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	227.504.964	6	42.422.888	6	42.290.400	6	41.753.448	20,00	18,35	6	41.499.200	18,00	125.675.536	60,00	55,24
						Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502	4	14.363.208	4	27.585.000	4	23.583.000	20,00	28,40	0	-	8,00	37.946.208	40,00	45,69
02	2.07	04 2	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	3.031.203.308	7.361	870.380.604	4.000	453.579.800	3.796	431.628.896	9,49	14,24	4.000	489.322.000	########	1.791.331.500	37,89	59,10
02	2.07	04 2	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi		60 Dokumen	316.496.699	12	47.681.252	12	42.604.400	12	41.917.448	20,00	13,24	12	60.328.000	36,00	149.926.700	60,00	47,37
02	2.07	04 2	2.03		Informasi Pasar Kerja Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	7.361	217.646.552	4.000	45.946.400	3.796	45.733.448	9,49	4,57	4.000	43.766.800	************	307.146.800	37,89	30,69
02	2.07	04 2	2.03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	5.000 Orang	1.714.006.714	1.704	605.052.800	1.000	365.029.000	877	343.978.000	17,54	20,07	500	385.227.200	3.081,00	1.334.258.000	61,62	77,84
02	2.07	04 2	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Melalui Job Fair /Bursa Kerja Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	1.200 Orang	1.043.113.786	140	137.870.224	70	116.676.900	140	102.778.500	11,67	9,85	40	222.076.000	320,00	462.724.724	26,67	44,36
02	2.07	04 2	2.04	01	Kabupaten/Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	800 Orang	559.970.481	100	37.782.940	50	25.310.000	50	23.107.500	6,25	4,13	0	-	150,00	60.890.440	18,75	10,87
02	2.07	04 2	2.04		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	. 483.143.304	40	100.087.284	20	91.366.900	20	79.671.000	5,00	16,49	40	222.076.000	100,00	401.834.284	25,00	83,17
02	2.07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	51,01 Persen	4.614.847.000	28,62	1.149.372.242	33,69	849.418.000	31,53	786.176.161	61,81	17,04	38,50	8.039.200.400	38,50	9.974.748.803	75,48	216,14
						Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	2,50 Persen		4,67		4,14		4,21		98,33		3,66		3,66		53,60	
						Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,00 Persen	•	61,38		74,00		62,62		70,36		79,00		79,00		88,76	
		05 2			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	525 Perusahaan	1.332.331.879	113	552.792.620	105	50.622.100	118	44.965.369	22,48	3,37	105	51.223.300	336,00	648.981.289	64,00	48,71
					Perusahaan	i Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	109	54.853.000	100	1.708.000	112	1.522.000	22,40	0,54	100	1.024.800	321,00	57.399.800	64,20	20,27
02	2.07	05 2	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	4	52.380.400	5	1.280.000	6	1.154.000	24,00	0,86	5	868.700	15,00	54.403.100	60,00	40,63
02	2.07	05 2	2.01		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315	12	445.559.220	12	47.634.100	12	42.289.369	20,00	4,62	12	49.329.800	36,00	537.178.389	60,00	58,69

02 :	2.07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	249	596.579.622	260	798.795.900	138	741.210.792	11,04	22,58	260	7.987.977.100	647,00	9.325.767.514	51,76	284,10
02					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		250 Perkara	622.236.026	52	180.230.800	60	99.582.000	41	97.327.000	16,40	15,64	60	77.126.300	153,00	354.684.100	61,20	57,00
02 2	2.07	05	2.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.000 Perkara	1.087.010.870	197	133.957.052	200	173.665.600	97	169.343.792	9,70	15,58	200	198.663.600	494,00	501.964.444	49,40	46,18
02					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909		28.538.700	12	16.766.000	9	16.260.000	15,00	9,77	12	9.861.200	21,00	54.659.900	35,00	32,85
02 2	2.07	05	2.02		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	3	188.873.170	2	162.630.800	2	161.490.000	3,33	15,07	2	250.299.300	7,00	600.662.470	11,67	56,04
02	2.07	05	2.02		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	150	64.979.900	100	346.151.500	100	296.790.000	26,67	88,59	35.782	7.452.026.700	*********	7.813.796.600	9.608,53	2.332,25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja;
- 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
- 3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
- 5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

Untuk bidang urusan tenaga kerja termasuk urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel sesuai format T-C.30 berikut:

Tabel 2.3 (Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Tahun 2023

		SPM/	IKK	Target	RENSTRA P	erangkat	Daerah	Real	isasi Capo	aian	Proyeksi	Catatan
No.	Indikator	Standar	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Analisa
		Nasional	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kegiatan yang											
	dilaksanakan yang	-	96,77	67,35	93,55	93,55	96,77	67,35	93,33	93,33	96,77	
	mengacu ke rencana											
	tenaga kerja											
2	Persentase Tenaga Kerja	_	1,20	0,41	0,58	0,70	1,03	0,41	0,53	0,65	1,03	
	Bersertifikat Kompetensi		1,20	0,41	0,50	0,70	1,03	0,41	0,55			
3	Tingkat Produktivitas	_	23,00	20,05	21,00	21,50	22,00	20,05	20,69	20,05	22,00	
	Tenaga Kerja		23,00	20,03	21,00	21,50	22,00	20,03	20,03	20,03	22,00	
4	Persentase Perusahaan											
	yang menerapkan tata		F1.01	28,62	29,84	33,69	00.50	28,62	30,75	31,53	38,50	
	kelola kerja yang layak	-	51,01				38,50					
	(PP/PKB, LKS Bipartit,											
	Struktur Skala Upah, dan											
	terdaftar peserta BPJS											
	Ketenagakerjaan)											
5	Persentase Tenaga kerja											
	yang ditempatkan (dalam	-	75,00		55,00	60,00	65,00		58,32	59,04	65,00	
	dan luar negeri) melalui		•		•	•	•		55,52	•	00,00	
	mekanisme layanan Antar											
	Kerja dalam wilayah kota											

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 93,33 persen dari target 93,55 persen kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja atau dengan capaian sebesar 99,77 persen. Dimana dari 30 jumlah kegiatan keseluruhan berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,65 persen dari target 0,70 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi atau dengan capaian sebesar 92,17 persen. Dimana dari 387.180 jiwa tenaga kerja sebanyak 24.98 jiwa tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 20,65 persen dari target 21,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja atau dengan capaian sebesar 93,26 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 96,25 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terhadap jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 31,53 persen dari target 33,69 persen Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak atau dengan capaian sebesar 93,58 persen. Dimana dari 3.194 perusahaan yang wajib menerapkan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.007 telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (terpenuhi 4 unsur)

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan terhadap jumlah mencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 59,04 persen dari target 60,00 persen Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota atau dengan capaian sebesar 98,40 persen. Dimana dari 5.315 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.138 orang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang

mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan pengangguran, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

- 1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
- 2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
- 3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi dalam yana memiliki peran sentral menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulwesi Selatan, tahun 2023 sebanyak 1.110.014 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 16,00 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk

hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentumini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi pemindahan investasi maupun ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan reengineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 kota Makassar memiliki 651.832 jiwa angkatan kerja, berkurang sebanyak minus 77.803 jiwa (minus 10,66 persen) dibandingkan tahun 2022. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor- sektor ekonomi produktif tidak mampu

menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2023, sebanyak 582.708 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan berkurang sebanyak minus 60.660 jiwa (minus 9,43 persen) dibandingkan tahun 2022, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 69.124 jiwa, berkurang sebanyak minus 17.143 jiwa (minus 19,87 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar menurun dari 11,82 persen di tahun 2022, menjadi 10,60 persen di tahun 2023. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019-2023

URAIAN	SAT			TAHUN		
OKAIAI	OAI	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia	Jiwa	1.144.563	1.199.282	1.215.200	1.230.996	1.110.014
Kerja						
Angkatan Kerja		661.226	696.158	725.529	729.635	651.832
- Bekerja		592.517	585.325	629.933	643.368	582.708
- Penganggur		68.709	110.833	95.596	86.267	69.124
Bukan Angkatan		483.337	503.124	489.671	501.361	458.182
Kerja						
- Sekolah		155.016	156.172	130.671	151.801	458.182
- Mengurus Rumah		267.847		267.390	280.306	
Tangga			280.399			
- Lainnya		60.474	66.553	91.610	69.254	
TPT		10,39%	15,92%	13,18%	11,82%	10,60%
TPAK		57,77%	58,05%	59,70%	59,27%	58,72%

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, serta sector konstruksi. Tahun 2023, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 19,67 persen, 18,01 persen, dan 16,73 persen terhadap pembentukan nilai

tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2023, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2023, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu elastisitas waspada, karena penyerapan tenaga perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan fokus kebijakan pengangguran, maka harusnya lebih pada pengembangan sektor industri pengolahan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis ini dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunites and Threats) dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Berikut hasil dari analisis:

Tabel 2.5
Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Strength

- Peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan yang mendukung;
- Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun;
- Tersedia sistem Informasi
 Pasar Kerja; dan
- Terbentuknya Forum HRD,
 Bursa Kerja Khusus (BKK), UP3,
 Dewan Tripartit, Dewan
 Pengupahan, LPK Binaan

Weaknesses

- Kurangnya Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan layanan yang diberikan (jumlah perusahaan di Kota Makassar, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja);
- Belum tersedianya database Ketenagakerjaan yang realtime;
- Keterbatasan anggaran; dan
- Masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan kegiatan lintas sektoral.

Opportunites

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar yang tinggi;
- Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan dan Kota Jasa;
- Jumlah Angkatan Kerja usia
 Produktif yang tinggi; dan
- Kerjasama sama dengan ADB dalam Program Jobstrat, BLKI Kementerian
 Ketenagakerjaan RI, dengan asosiasi pengusaha dalam pemagangan, Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam Pemagangan Luar Negeri (Jepang).

hreats

- Bonus demografi apabila tidak dapat dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja atau tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akibat kurangnya SDM Tenaga Kerja;
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tidak diiringi oleh elastisitas penyerapan kesempatan kerja;;
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk wajib lapor Ketenagakerjaan;
- Investasi di Kota Makassar masih merupakan padat modal bukan padat karya;
- Urbanisasi yang tidak diikuti oleh SDM yang siap bersaing; dan
- Masih tingginya Angka
 Sengketa Pengusaha-Pekerja

Berdasarkan analisa di atas, berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan:

- 1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
- 2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
- 3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Dari hasil analisis SWOT tersebut juga kemudian dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Strength and Opportunities (SO)

Memanfaatkan Informasi lowongan kerja secara akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan daya tarik para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun, kerjasama sama dengan stakeholder dan keterlibatan dunia pendidikan serta dunia usaha dalam menciptakan tenaga kerja trampil yang dapat berdaya saing dalam penyerapan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Strength and Threats (ST)

Memberikan pemahaman dan meningkatkan pemantauan pada perusahaan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk dapat memberikan kesadaran wajib lapor. Meningkatkan informasi lowongan kerja yang akan memberikan minat atau kepercayaan kepada pencari kerja. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

3. Weaknesses and Opportunities (WO)

Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang terampil pada setiap bidang dan membuat aplikasi database Ketenagakerjaan yang realtime (SARRING) untuk memperlancar proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan memudahkan pencari kerja dan penyedia kerja dapat berinteraksi secara langsung secara online.

4. Weaknesses and Threats (WT)

Menambah jumlah pejabat fungsional Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Ketenagakerjaan. Menyusun regulasi untuk lebih memperketat dalam pengawasan wajib lapor Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Telaahan teradap rancangan awal Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal Perubahan RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan Perubahan RENJA SKPD.

Adapun rancangan awal usulan Perubahan RENJA tahun 2024 sebesar Rp.24.618.127.570,- (dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah. Setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan

analisis kebutuhan pada rancangan akhir usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.23.530.012.761,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel format Formulir T-C.31 berikut:

TABEL 2.6 (FORMAT T-C.31) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PEUBAHAN RKPD TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR

NAI	//A P	'ER/	NG	KAT	DAERAH : DINAS KETENAGAKERJA										
						R	ancangan Awal RKPD				Ra	ncangan Akhir RKPD			Catatan
		Ko	de		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp)	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02					URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
	2.07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				23.530.012.761	
02	2.07	7 01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00 Persen	11.456.197.920	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00 Persen	11.420.696.861	
							Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00 Persen				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00 Persen		
							Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00 Persen				Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00 Persen		
02	2.07	7 01	2.0)1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	70.870.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	71.310.300	
02	2.07	7 01	2.0	01 00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	49.159.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	49.159.000	
02	2.07	7 01	2.0	01 0	O2 Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	n Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.237.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.377.000	
02	2.07	7 01	2.0	01 0	Noordinasi dan Penyusunan Dokume Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.699.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.899.400	
					04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.329.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.429.800	
02	2.07	7 01	2.0	01 0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.769.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.769.800	
02	2.07	7 01	2.0	01 0	16 Koordinasi dan Penyusunan Laporar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5.286.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5.286.300	

							1			I 		1		
)2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota	Jumlah Laporan	2 Dokumen	3.389.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota	Jumlah Laporan	2 Dokumen	3.389.000
						Makassar	Evaluasi Kinerja				Makassar	Evaluasi Kinerja		
٠.	0 07	04	0.00		Administrati Kananana Bananalat	1/-4-	Perangkat Daerah	00 D-I	0.400.000.000	Administrati Kanananan Bananalat	1/-4-	Perangkat Daerah	00 D-1	0.500.040.404
P	2.07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Kota	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	8.492.302.636	Administrasi Keuangan Perangkat	Kota	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	8.560.610.161
					Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan			Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan		
							Administrasi					Administrasi		
							Keuangan Perangkat					Keuangan Perangkat		
,	0.07	04	0.00	04	Daniel de la Cali des Tunies des ACN	17-4-	Daerah	C4 One of Bullet	0.040.007.400	Danieliana Orli dan Territanana AGNI	1/-4-	Daerah	C4 Oran of Bullon	0.445.444.004
2 2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota	Jumlah Orang yang	61 Orang/ Bulan	8.046.837.436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota	Jumlah Orang yang	61 Orang/ Bulan	8.115.144.961
						Makassar	Menerima Gaji dan				Makassar	Menerima Gaji dan		
	0.07	-	2.02	00	Daniel de la Administra di Dalabara	17-4-	Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil	40. Deliumen	005 000 000	Daniel dia and Administrati Delaboration	1/-4-	Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil	40. Deliumen	265.320.000
۱۷ (2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kota		12 Dokumen	265.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kota		12 Dokumen	265.320.000
					Tugas ASN	Makassar	Penyediaan Administrasi			Tugas ASN	Makassar	Penyediaan Administrasi		
							Pelaksanaan Tugas					Pelaksanaan Tugas		
							ASN					ASN		
12 '	2.07	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	144.145.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	144.145.200
<u>'</u> ا ''	2.07	١٠٠	2.02	03	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Penatausahaan dan	12 Dokumen	144.145.200	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Penatausahaan dan	12 Dokumen	144.145.200
					r engujian/vernikasi kedangan okt b	iviakassai	Pengujian/Verifikasi			li engujian/verilikasi Kedangan SKI D	iviakassai	Pengujian/Verifikasi		
							Keuangan SKPD					Keuangan SKPD		
12	2 07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota	Jumlah Laporan	0 Laporan	36 000 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota	Jumlah Laporan	0 Laporan	36.000.000
´- ·		۱'	02	01	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Makassar	Keuangan Bulanan/	o Laporan	55.000.000	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Makassar	Keuangan Bulanan/	o Laporan	55.000.000
		- [Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran			Semesteran SKPD	aaooai	Triwulanan/Semesteran		
					Composition on D		SKPD dan Laporan			Composition of D		SKPD dan Laporan		
		- [Koordinasi Penyusunan					Koordinasi Penyusunan		
							Laporan Keuangan					Laporan Keuangan		
							Bulanan/ Triwulanan/					Bulanan/ Triwulanan/		
							Semesteran SKPD					Semesteran SKPD		
12	2.07	01	2 03		Administrasi Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	133 681 200	Administrasi Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	126.524.400
- I		٠.۱			pada Perangkat Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan	12 2011111111		pada Perangkat Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan	12 20114111011	
							Administrasi BMD					Administrasi BMD		
							pada Perangkat					pada Perangkat		
							Daerah					Daerah		
)2 :	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	34.735.200	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	27.578.400
					SKPD	Makassar	Pengamanan Barang			SKPD	Makassar	Pengamanan Barang		
							Milik Daerah SKPD					Milik Daerah SKPD		
)2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	98.946.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	98.946.000
					pada SKPD	Makassar	Penatausahaan Barang			pada SKPD	Makassar	Penatausahaan Barang		
							Milik Daerah pada					Milik Daerah pada		
							SKPD					SKPD		
)2	2.07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	332.946.000	Administrasi Kepegawaian	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	332.946.000
					Perangkat Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan			Perangkat Daerah	Makassar	Hasil Penyediaan		
							Administrasi					Administrasi		
							Kepegawaian					Kepegawaian		
							Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
)2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Kota	Jumlah Paket Pakaian	110 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Kota	Jumlah Paket Pakaian	110 Paket	-
					Atribut Kelengkapannya	Makassar	Dinas beserta Atribut			Atribut Kelengkapannya	Makassar	Dinas beserta Atribut		
	2.07	-	2.05	00	Dandeteen den Der!-!	V-4-	Kelengkapan	12 Del:	00.040.000	Dandataan dan Day I-1	V-+-	Kelengkapan	40. Del	00 040 000
J2	2.07	ן דט	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	98.946.000	Pendataan dan Pengolahan	Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	98.946.000
					Administrasi Kepegawaian	Makassar	Pendataan dan			Administrasi Kepegawaian	Makassar	Pendataan dan		
							Pengolahan					Pengolahan		
		- [Administrasi					Administrasi		
12	2.07	01	2.05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota	Kepegawaian	10 Orang	234 000 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota	Kepegawaian	10 Orang	234.000.000
12	2.07	١١٧	∠.∪5				Jumlah Pegawai	io Orang	∠34.000.000			Jumlah Pegawai	io Orang	∠34.000.000
		- [Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Berdasarkan Tugas			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		
		- [dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan					Mengikuti Pendidikan		
							dan Pelatihan					Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
12	2 07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi	Kota	Jumlah Orang yang	0 Orang	^	Bimbingan Teknis Implementasi	Kota	Jumlah Orang yang	0 Orang	0
' ا ''	2.01	١''	2.00	10	Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Mengikuti Bimbingan	U Orang	U	Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Mengikuti Bimbingan	U Clariy	o o
		- [i eraturan rerunuang-unuangan	iviandSSdf	Teknis Implementasi			i eraturan Ferunuang-Unuangan	ivianassaf	Teknis Implementasi		
							Peraturan Perundang-					Peraturan Perundang-		
				Undangan					Undangan					

2	.07	01	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	746.382.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	746.382.900
)2 2	.07	01	2.06	6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800
2 2	.07	01	2.06	6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200
2 2	.07	01	2.06	6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.827.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.827.300
2 2	.07	01	2.06	6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600
2 2	.07	01	2.06	6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000
				6 09	dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	483.500.000
2 2	.07	01	2.06	6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	48.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	48.000.000
2 2	.07	01	2.07	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 Unit	356.233.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 Unit	356.245.000
2	.07	01	2.07	7 05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	226.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	200.000.000
2 2	.07	01	2.07	7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	130.233.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	156.245.000
2 2	.07	01	2.07	7 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0
2 2	.07	01	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	882.942.884	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	792.054.500
)2 2	.07	01	2.08	8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600
				8 02	Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.443.300
)2 2	.07	01	2.08	8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.297.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	337.297.600

02	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	63 Unit	440.839.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	63 Unit	434.623.600
02	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000
02	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	254.173.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	247.957.600
02	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.950.000
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0
			2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	105.336.000
02	2.07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	. 93,55 Persen	149.040.400	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	. 93,55 Persen	149.040.400
02	2.07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	149.040.400	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	149.040.400
02	2.07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200
02	2.07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	37.533.200	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	37.533.200
02	2.07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,70 Persen	3.203.613.800	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,70 PERSEN	3.152.283.800
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Peserta	21,50 Persen 1.000 Orang				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Peserta	21,50 PERSEN 1.000 ORANG	
							Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.500 Clang				Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	noor cranc	
02	2.07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.132.128.300	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.084.128.300
02	2.07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.123.615.300	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.075.615.300

				02	Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatar/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024		8.513.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinas i dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	50 Lembaga	8.513.000
02	2.07	7 03	3 2.0	12	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400
02	2.07	7 03	3 2.0	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400
02	2.07	7 03	3 2.0	13	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300
02	2.07	7 03	3 2.0	03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300
02	2.07	7 03	3 2.0)4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300
02	2.07	7 03	3 2.0	04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300
02	2.07	7 03	3 2.0	15	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.422.612.500	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.419.282.500
02	2.07	7 03	3 2.0	05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.422.612.500	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.419.282.500
02	2.07	7 04	1		Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	60,00 Persen . 8.640 Peluang Kerja	2.588.781.350	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	60,00 Persen . 8.640 Peluang Kerja	1.706.286.600
02	2.07	7 04	4 2.0	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.909 Orang	1.835.884.150	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.909 Orang	1.338.616.600

			2.01		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	-
					Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang		Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang	142.778.400
02 2	2.07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	-	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	-
02 2	2.07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	235.120.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	205.247.600
					Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	209 Orang	1.455.817.750	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	209 Orang	990.590.600
02 2	2.07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200
02 2	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200
02 2	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	-	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	-
02 2	2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	489.322.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	104.094.800
02 2	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	60.328.000
			2.03		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	43.766.800
02 2	2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000 Orang	385.227.200	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	- Orang	-
02 2	2.07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	120 Orang	222.076.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	120 Orang	222.076.000
02 2	2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	-

02 2	2.07	04 2.0	.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang. Diberdayakan	20 Orang	222.076.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang. Diberdayakan	20 Orang	222.076.000
02 2	2.07	05		Program Hubungan Industrial	Kota Makassar	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	33,69 Persen	7.220.494.100	Program Hubungan Industrial	Kota	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	33,69 Persen	7.101.705.100
						Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14 Persen				Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14 Persen	
						Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	74,00 Persen				Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	74,00 Persen	
02 2	2.07	05 2.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	105 Perusahaan	51.223.300	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	105 Perusahaan	47.893.300
02 2	2.07	05 2.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.024.800	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.024.800
02 2	2.07	05 2.0	.01	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	868.700	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	868.700
02 2	2.07	05 2.0	01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	49.329.800	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	45.999.800
02 2	2.07	05 2.0	02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	7.169.270.800	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perustupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	7.053.811.800
02 2	2.07	05 2.0	.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	186.473.800	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	77.126.300

02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Kota	Jumlah Perkara	200	Perkara	198.663.600	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Kota	Jumlah Perkara	200 Perkara	198.663.600
					Industrial, Mogok Kerja, dan	Makassar	Perselisihan yang				Industrial, Mogok Kerja, dan	Makassar	Perselisihan yang		
					Penutupan Perusahaan yang		Terselesaikan				Penutupan Perusahaan yang		Terselesaikan		
					Berakibat/ Berdampak pada						Berakibat/ Berdampak pada				
					Kepentingan di 1 (satu) Daerah						Kepentingan di 1 (satu) Daerah				
					Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota				
ົງ2	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan	Kota	Jumlah Asosiasi	12	Asosiasi dan	9.861.200	Penyelenggaraan Verifikasi dan	Kota	Jumlah Asosiasi	12 Asosiasi dan	9.861.200
					Rekapitulasi Keanggotaan pada	Makassar	Pengusaha dan Serikat		Serikat		Rekapitulasi Keanggotaan pada	Makassar	Pengusaha dan Serikat	Serikat	
					Organisasi Pengusaha, Federasi dan		Pekerja yang		Pekerja		Organisasi Pengusaha, Federasi dan		Pekerja yang	Pekerja	
					Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat		Diverifikasi				Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat		Diverifikasi		
					Buruh serta Non Afiliasi						Buruh serta Non Afiliasi				
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga	Kota	Jumlah LKS Tripartit	2	Lembaga	250.299.300	Pelaksanaan Operasional Lembaga	Kota	Jumlah LKS Tripartit	2 Lembaga	250.299.300
					Kerjasama Tripartit Daerah	Makassar	yang Dibina				Kerjasama Tripartit Daerah	Makassar	yang Dibina		
					Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota				
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Kota	Terlaksananya	100	Orang	6.523.972.900	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Kota	Terlaksananya	100 Orang	6.517.861.400
					Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Makassar	Program Jaminan				Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Makassar	Program Jaminan		
					Kesejahteraan Pekerja		Sosial Tenaga Kerja				Kesejahteraan Pekerja		Sosial Tenaga Kerja		
							dan Fasilitas						dan Fasilitas		
				1			Kesejahteraan Pekerja						Kesejahteraan Pekerja		

2.5. Penelahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu dari 9 (Sembilan) Kecamatan. Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) usulan kegiatan yang masuk yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan;
- 2. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan yang terakomodir pada Forum SKPD Kota Makassar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan atau sebesar 100 persen;
- 3. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) usulan merupakan hasil Musrenbang dan 6 (enam) usulan merupakan dari Pokok Pikiran DPRD; dan
- 4. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja;

Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2023 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar sebagaimana disajikan pada tabel 2.7 sesuai format Formulir T-C.32 berikut:

Tabel 2.7 (Format T-C.32) Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Makassar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/	Catatan
				Volume	
1	Perluasan	JI Barukang	Jumlah Peserta	2	Terakomodir
	Kesempatan Kerja	No127	Pelatihan Kerajinan	angkatan	10 orang
		Kelurahan	Tangan		
		Gusung ,			
		Kecamatan			
		Ujung Tanah			
2	Proses	JI Barukang	Jumlah Peserta	3	Terakomodir
	Pelaksanaan	127 Kelurahan	Pelatihan Komputer	angkatan	30 orang
	Pendidikan dan	Gusung,	dan Aplikasi		
	Pelatihan				

	T		T		
	Keterampilan bagi	Kecamatan			
	Pencari Kerja	Ujung Tanah			
	berdasarkan				
	Klaster Kompetensi				
3	Perluasan	Tamalabba,	Jumlah Peserta	50 orang	Terakomodir
	Kesempatan Kerja	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan		20 orang
		Ujung Tanah	Tangan		
4	Proses	Jl. Bandang IV	Jumlah Peserta	20 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	No. 2	Pelatihan		10 orang
	Pendidikan dan	Kelurahan	Pengelasan/Perbengk		
	Pelatihan	Parang,	elan "Welding"		
	Keterampilan bagi	Kecamatan			
	Pencari Kerja	Bontoala			
	berdasarkan				
	Klaster Kompetensi				
5	Proses	Jl. Bandang IV	Jumlah Peserta	20 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	No. 2	Pelatihan Service AC		15 orang
	Pendidikan dan	Kelurahan	dan Alat Listrik		
	Pelatihan	Parang,	Lainnya		
	Keterampilan bagi	Kecamatan			
	Pencari Kerja	Bontoala			
	berdasarkan				
	Klaster Kompetensi				
6	Proses	Kelurahan	Jumlah Peserta	35 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Pandang,	Pelatihan Sablon Baju		5 orang
	Pendidikan dan	Kecamatan			-
	Pelatihan	Panakkukang			
	Keterampilan bagi	_			
	Pencari Kerja				
	berdasarkan				
	Klaster Kompetensi				
7	Proses	Kelurahan	Jumlah Peserta	19 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Buloa,	Pelatihan Komputer		20 orang
	Pendidikan dan	Kecamatan	dan Aplikasi		
	Pelatihan	Tallo			
	Keterampilan bagi				
	Pencari Kerja				
	berdasarkan				
	Klaster Kompetensi				
8	Proses	Jl. Toddopuli	Jumlah Peserta	20 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Raya No. 100	Pelatihan Service AC		10 orang
	Pendidikan dan	, RT.01 RW.09,	dan Alat Listrik		Ĭ
	Pelatihan	Kelurahan	Lainnya		
	Keterampilan bagi	Paropo,	,		
	Pencari Kerja	·			
	ı	l			

	I				
	berdasarkan	Kecamatan			
	Klaster Kompetensi				
9	Proses	Jalan	Jumlah Peserta	50 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Sabutung	Pelatihan Komputer		50 orang
	Pendidikan dan	Timur No. 200	dan Aplikasi		
	Pelatihan	Kelurahan			
	Keterampilan bagi	Patingalloang			
	Pencari Kerja	Baru			
	berdasarkan	Kecamatan			
	Klaster Kompetensi	Ujung Tanah			
10	Proses	Pulau Barrang	Jumlah Peserta	5 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Lompo RT 04	Pelatihan Menjahit		5 orang
	Pendidikan dan	RW 02,	Tingkat Dasar		
	Pelatihan	Kelurahan			
	Keterampilan bagi	Barrang			
	Pencari Kerja	Lompo,			
	berdasarkan	Kecamatan			
	Klaster Kompetensi	Kepulauan			
		Sangkarrang			
11	Proses	Jalan Garuda	Jumlah Peserta	15 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Buntu No. 79	Pelatihan Sablon Baju		15 orang
	Pendidikan dan	RT. 7 RW. 02			
	Pelatihan	Kelurahan			
	Keterampilan bagi	Kunjung Mae			
	Pencari Kerja	Kecamatan			
	berdasarkan	Mariso			
	Klaster Kompetensi				
12	Proses	Jalan	Jumlah Peserta	10 orang	Terakomodir
	Pelaksanaan	Cendrawasih	Pelatihan Tata		10 orang
	Pendidikan dan	Lorong 31 RT.	Boga/Masakan/Pengo		
	Pelatihan	06 RW. 02	lahan		
	Keterampilan bagi	Kelurahan	Makanan/Kuliner		
	Pencari Kerja	Kunjung Mae			
	berdasarkan	Kecamatan			
	Klaster Kompetensi	Mariso			
13	Proses	Jl. Rappocini	Jumlah Peserta		Terakomodir
	Pelaksanaan	Raya Lr. 9	Pelatihan Menjahit		10 orang
	Pendidikan Dan	(Depan Kost	Tingkat Dasar		
	Pelatihan	Josua) Kel.			
	Keterampilan Bagi	Buakana, Kec.			
	Pencari Kerja	Rappocini,			
	Berdasarkan	Kota			
	Klaster Kompetensi	Makassar			
		(H.IRWAN			
		DJAFAR,			

		CE /EDAKCI		
		SE/FRAKSI		
		NASDEM)		
14	Perluasan	Jl. Manunggal	Jumlah Peserta	Terakomodir
	Kesempatan Kerja	31 No. 13 RT	Pelatihan Kerajinan	10 orang
		05/RW 01	Tangan	
		Kelurahan		
		Maccini		
		Sombala		
		Kecamatan		
		Tamalate,		
		Kota		
		Makassar		
		(BUDI		
		HASTUTI/		
		FRAKSI		
		GERINDRA)		
15	Proses	Jl. Bangkala 2	Jumlah Peserta	Terakomodir
	Pelaksanaan	No. 43, Kota	Pelatihan Menjahit	10 orang
	Pendidikan Dan	Makassar	Tingkat Dasar	
	Pelatihan	(AZWAR,		
	Keterampilan Bagi	ST/FRAKSI		
	Pencari Kerja	PKS)		
	Berdasarkan			
	Klaster Kompetensi			
16	Perluasan	Jl. Bangkala 2	Jumlah Peserta	Terakomodir
	Kesempatan Kerja	No. 43, Kota	Pelatihan Kerajinan	10 orang
		Makassar	Tangan	
		(AZWAR,		
		ST/FRAKSI		
		PKS)		

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan hasil (RENJA) evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 serta mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total 55 subkegiatan, terdapat 32 subkegiatan (53,33%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 7 subkegiatan (11,67%) mengalami penambahan anggaran dan 21 subkegiatan (35,00%) mengalami pengurangan. Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh

puluh rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja pagu indikatif menjadi sebesar Rp. Rp.23.530.012.761,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.657.361.109,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).

Adapun rincian Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Jumlah Pada DPA Pokok	Tidak Mengalami Perubahan	Mengalami Penambahan Pagu	Mengalami Pengurangan Anggaran
1	Program	5	1	2	2
2	Kegiatan	20	6	9	5
3	Sub Kegiatan	55	35	13	11

Adapun Rincian Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai Format I.I. berikut:

TABEL 3.2 (FORMAT I.I) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

					Bidang Urusan Pemerintahan,	Indikator Kinaria (Brogram	m/Kegiatan/Sub Kegiatan)				Tahun Rencana 2	024			Perangkat
	к	ode	•		Program, Kegiatan Dan Sub	indikator Kinerja (Prograf	n/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Lol	kasi	Target	Kinerja	Kebutuha	n Dana/Pagu Indikat	if (Rp)	Daerah
					Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Penanggun Jawab
		(1)			(2)	(3)				(5)		(6)			(12)
					URUSAN WAJIB										
	.07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	TENAGA KERJA						24.187.373.870	23.530.012.761	(657.361.109)	
2 2	.07 0	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar	Kota Makassar	90,00 Persen	90,00 Persen	10.406.337.920	11.420.696.861	1.014.358.941	Disnaker
						Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			100,00 Persen	100,00 Persen				
						Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			90,00 Persen	90,00 Persen				
2 2	.07 0	1 2	2.01		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	131.310.300	71.310.300	(60.000.000)	Disnaker
2	.07 0	1 2	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	109.159.000	49.159.000	(60.000.000)	Disnaker
2	.07 0	1 2	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.377.000	5.377.000	0,00	Disnaker
2	.07 0	1 2	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.400	3.899.400	0,00	Disnaker
2	.07 0	1 2	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.429.800	2.429.800	0,00	Disnake
2	.07 0	1 2	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.769.800	1.769.800	0,00	Disnake
2	.07 0	1 2	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Dokumen	4 Dokumen	5.286.300	5.286.300	0,00	Disnake
	.07 0			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	3.389.000	3.389.000	0,00	Disnake
	.07 0				Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	36 Dokumen	36 Dokumen	7.328.002.636	8.560.610.161	1.232.607.525	Disnake
L					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	6.882.537.436	8.115.144.961	1.232.607.525	Disnake
2	.07 0	1 2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	265.320.000	265.320.000	0,00	Disnake

)2	2.07	01	2.	02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	144.145.200	144.145.200	0,00	Disnaker
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan	Penatausahaan dan	Makassar	Makassar					.,	
							Pengujian/Verifikasi Keuangan								
4			\perp			SKPD	SKPD								
2	2.07	01	2.	02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kota	Kota	0 Laporan	0 Laporan	36.000.000	36.000.000	0,00	Disnaker
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Bulanan/ Triwulanan/	Bulanan/ Triwulanan/	Makassar	Makassar						
ı					Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan	Semesteran SKPD dan								
1						Laporan Koordinasi	Laporan Koordinasi								
						Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan								
1						Keuangan Bulanan/	Keuangan Bulanan/								
\perp						Triwulanan/ Semesteran SKPD									
2	2.07	01	2.	03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	181.681.200	126.524.400	(55.156.800)	Disnake
1					pada Perangkat Daerah		Penyediaan Administrasi	Makassar	Makassar						
4			_			BMD pada Perangkat Daerah									
2	2.07	01	2.	03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	Jumlah Dokumen Pengamanan	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	82.735.200	27.578.400	(55.156.800)	Disnake
1					SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Makassar						
2	2.07	01	2.	03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Kota	Kota	12 Laporan	12 Laporan	98.946.000	98.946.000	0,00	Disnake
ı					pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik	Penatausahaan Barang Milik	Makassar	Makassar						
ı						Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD								
!	2.07	01	2.	05	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	332.946.000	332.946.000	0,00	Disnak
1					Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi	Makassar	Makassar						
ı							Kepegawaian Perangkat								
1		_	_				Daerah								
1	2.07	01	2.	05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Kota	Kota	- Paket	- Paket	-	-	0,00	Disnak
4		1	1		Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan	beserta Atribut Kelengkapan	Makassar	Makassar						
1	2.07	01	2.	05 0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan	Jumlah Dokumen Pendataan	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	98.946.000	98.946.000	0,00	Disnak
1					Administrasi Kepegawaian	dan Pengolahan Administrasi	dan Pengolahan Administrasi	Makassar	Makassar						
4		1	1			Kepegawaian	Kepegawaian				_				
1	2.07	01	2.	05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan	Kota	Kota	12 Orang	12 Orang	234.000.000	234.000.000	0,00	Disnak
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang	Tugas dan Fungsi yang	Makassar	Makassar							
1						Mengikuti Pendidikan dan	Mengikuti Pendidikan dan								
4			1_			Pelatihan	Pelatihan						_		
1	2.07	01	2.	05 0010	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kota	Kota	0 Orang	0 Orang	0	0	0,00	Disnake
1					Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi		Makassar	Makassar						
						Peraturan Perundang-	Peraturan Perundang-								
+			-	00	Administrative at the core Barrary start	Undangan	Undangan	16-4-	16-4-	7 1	7 1	000 000 000	740,000,000	(450,000,000)	Diamata
1	2.07	01	Z.	06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Jenis Jasa	Jumlah Jenis Jasa	Kota	Kota	7 Jenis	7 Jenis	902.382.900	746.382.900	(156.000.000)	Disnake
ı					Daerah		Adminitrasi Umum yang Tersedia	Makassar	Makassar						
+	2.07	. 01	1	06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Jumlah Paket Komponen	Kota	Kota	1 Paket	1 Paket	13.312.800	13.312.800	0,00	Disnake
1	2.01	101	12.	00 000	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/ Penerangan	Instalasi Listrik/ Penerangan	Makassar	Makassar	i Faket	I Faket	13.312.000	13.312.000	0,00	DISHAN
ı					Listilit/Felleraligali Ballgullali Kalitoi		Bangunan Kantor yang	Makassai	iviakassai						
ı						Disediakan	Disediakan								
,	2 07	01	12	06 0003	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Kota	Kota	5 Paket	5 Paket	75.977.200	75.977.200	0,00	Disnake
1	2.01	101	12.	00 0002	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang	Perlengkapan Kantor yang	Makassar	Makassar	3 Faket	3 Faket	15.911.200	15.911.200	0,00	DISHAN
1					renengkapan Kantoi	Disediakan	Disediakan	Makassai	iviakassai						
+	2 07	01	12	06 000/	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kota	Kota	2 Paket	2 Paket	76.827.300	76.827.300	0,00	Disnake
1	2.01	101	12.	00 000-	l enyediaan bahan Logistik Kantoi	Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan	Makassar	Makassar	Z i aket	Z i aket	70.027.300	70.027.300	0,00	Distract
,	2 07	01	12	06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Kota	Kota	2 Paket	2 Paket	22.665.600	22.665.600	0,00	Disnak
1	2.01	10.	12.	00 0000	Penggandaan	dan Penggandaan yang	dan Penggandaan yang	Makassar	Makassar	Z i dilot	2 i dilot	22.000.000	22.000.000	0,00	Distract
ı					. ongganadan	Disediakan	Disediakan	manaooa	manaooai						
t	2.07	01	2.	06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000	26.100.000	0.00	Disnak
ľ		1.	1-		Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan	Bacaan dan Peraturan	Makassar	Makassar					-,	
ı					g		Perundang-Undangan yang								
l						Disediakan	Disediakan								
1	2.07	01	2.	06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Kota	Kota	12 Laporan	12 Laporan	483.500.000	483.500.000	0,00	Disnak
ľ		1.	1	1	dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat	Makassar	Makassar	p = - = - :	p = - =			2,30	
						Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi								
						SKPD	SKPD								
1	2.07	01	2.	06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan	Jumlah Dokumen Dukungan	Kota	Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	204.000.000	48.000.000	(156.000.000)	Disnak
ľ		1	1	1	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Sistem	Pelaksanaan Sistem	Makassar	Makassar					,	
					pada SKPD	Pemerintahan Berbasis	Pemerintahan Berbasis								
- 1		1	1	- 1	ľ	Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD								
1						Elektroriik pada SKFD	Elektroriik pada SKFD								

)2 2.	07	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	25 Unit	25 Unit	356.233.000	356.245.000	12.000	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	16 Unit	16 Unit	226.000.000	200.000.000	(26.000.000)	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	9 Unit	9 Unit	130.233.000	156.245.000	26.012.000	Disnaker
2 2	07	01	2.0	07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	0 Unit	0	0	0,00	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	36 Laporan	36 Laporan	732.942.884	792.054.500	59.111.616	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	158.313.600	158.313.600	0,00	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	337.331.684	296.443.300	(40.888.384)	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	237.297.600	337.297.600	100.000.000	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	74 Unit	74 Unit	440.839.000	434.623.600	(6.215.400)	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	44.380.000	44.380.000	0,00	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	Kota Makassar	17 Unit	17 Unit	254.173.000	247.957.600	(6.215.400)	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	55 Unit	55 Unit	36.950.000	36.950.000	0,00	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	0 Unit	0	0	0,00	Disnaker
)2 2.	07	01	2.0	09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	105.336.000	105.336.000	0,00-	Disnaker
)2 2.	07	02			Kerja	Dilaksanakan Yang Mengacu	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	93,55 Persen	93,55 Persen	149.040.400	149.040.400	0,00-	Disnaker
2 2.	07	02	2.0	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	149.040.400	149.040.400	0,00	Disnaker
2.	07	02	2.0	01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	111.507.200	111.507.200	0,00	Disnaker
)2 2.	07	02	2.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	Kota Makassar	50 Perusahaan	50 Perusahaan	37.533.200	37.533.200	0,00	Disnaker
2.	07	03					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kota Makassar	Kota Makassar	1,03 Persen	1,03 Persen	3.203.613.800	3.152.283.800	(51.330.000)	Disnaker
						Kerja			. 22,00 Persen	. 22,00 Persen				•	
						Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan			1.190 Orang	1.190 Orang				
)2 2.	07	03	2.0		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun ke n		Kota Makassar	Kota Makassar	240 Orang	240 Orang	1.132.128.300	1.084.128.300	(48.000.000)	Disnaker
2.	07	03	2.0		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Makassar	Kota Makassar	240 Orang	240 Orang	1.123.615.300	1.075.615.300	(48.000.000)	Disnaker

2 2	177	ا در	2.04	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja	Jumlah	Jumlah	Kota	Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	8.513.000	8.513.000	0.00	Disnaker
" 2	.07	ادن	2.01		Sama dengan Sektor Swasta untuk	Kesepakatan/Koordinasi dalam	Kesepakatan/Koordinasi dalam	Makassar	Makassar	50 Lembaga	50 Lembaga	6.513.000	6.513.000	0,00	Distraker
					Penyediaan Instruktur serta Sarana			wakassar	Makassar						
						rangka Optimalisasi Kapasitas	rangka Optimalisasi Kapasitas								
1					dan Prasarana Lembaga Pelatihan	Instruktur dan Peningkatan	Instruktur dan Peningkatan								
					Kerja	Sarana Prasarana Pelatihan	Sarana Prasarana Pelatihan								
						Vokasi dan Produktivitas pada	Vokasi dan Produktivitas pada								
		_				Tahun n	Tahun n								
2 2	.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan	Kota	Kota	80 Lembaga	80 Lembaga	34.813.400	34.813.400	0,00	Disnaker
_		_			Kerja Swasta	Kerja Swasta yang Dibina	Kerja Swasta yang Dibina	Makassar	Makassar						
2 2	2.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan	Kota	Kota	80 Lembaga	80 Lembaga	34.813.400	34.813.400	0,00	Disnaker
					Swasta	Kerja Swasta yang Dibina	Kerja Swasta yang Dibina	Makassar	Makassar						
2 2	.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran	Jumlah Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya			12 Perizinan	12 Perizinan	214.774.300	214.774.300	0,00	Disnaker
					Lembaga Pelatihan Kerja	Perizinan Lembaga Pelatihan	Perizinan Lembaga Pelatihan								
						Kerja Secara Terintegrasi	Kerja Secara Terintegrasi								
┸															
2 2	.07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan		Jumlah Sumber Daya Perizinan	Kota	Kota	12 Perizinan	12 Perizinan	214.774.300	214.774.300	0,00	Disnaker
					Lembaga Pelatihan Kerja secara	Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja	Makassar	Makassar						
					Terintegrasi	Secara Terintegrasi	Secara Terintegrasi								
2 2	.07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada	Jumlah Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil	Kota	Kota	120 Perusahaan	120 Perusahaan	399.285.300	399.285.300	0,00	Disnake
					Perusahaan Kecil	yang Mendapat Konsultansi	yang Mendapat Konsultansi	Makassar	Makassar						
						Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Produktivitas								
2 2	.07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang	Jumlah Perusahaan Kecil yang	Kota	Kota	120 Perusahaan	120 Perusahaan	399.285.300	399.285.300	0,00	Disnaker
					kepada Perusahaan Kecil	Mendapat Konsultansi	Mendapat Konsultansi	Makassar	Makassar						
						Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Produktivitas								
2	.07	03	2.05	i	Pengukuran Produktivitas Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.612.500	1.419.282.500	(3.330.000)	Disnake
					Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas	Pengukuran Produktivitas	Makassar	Makassar						
						dan Daya Saing Tenaga	dan Daya Saing Tenaga								
l						Kerja di Tingkat Daerah	Kerja di Tingkat Daerah								
2	.07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.612.500	1.419.282.500	(3.330.000)	Disnake
					Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas dan	Pengukuran Produktivitas dan	Makassar	Makassar					` 1	
					ŭ ,	Daya Saing Tenaga Kerja di	Daya Saing Tenaga Kerja di								
						Tingkat Daerah	Tingkat Daerah								
2 2	2.07	04			Program Penempatan Tenaga	Persentase Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja	Kota	Kota	65.00 Persen	65.00 Persen	2.389.181.350	1.706.286.600	(682.894.750)	Disnake
					Kerja	Yang Ditempatkan Melalui	Yang Ditempatkan Melalui	Makassar	Makassar					` 1	
					•	Mekanisme Layanan Antar	Mekanisme Layanan Antar								
						Kerja Dalam Wilayah Kota	Kerja Dalam Wilayah Kota								
						Makassar	Makassar			•	•				•
						Jumlah Peluang Kerja Dan	Jumlah Peluang Kerja Dan			9.555 Peluang	9.555 Peluang				
						Peluang Bisnis Baru	Peluang Bisnis Baru			Kerja	Kerja				
2 2	.07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah	Jumlah Tenaga kerja yang	Jumlah Tenaga kerja yang	Kota	Kota	3.713 Orang	3.713 Orang	1.636.284.150	1.338.616.600	(297.667.550)	Disnakei
					Kabupaten/Kota	Ditempatkan, Diberdayakan	Ditempatkan, Diberdayakan	Makassar	Makassar	_	_				
					·	dan Fasilitasi Layanan	dan Fasilitasi Layanan								
2	.07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan	Jumlah SDM Pelayanan antar	Jumlah SDM Pelayanan antar	Kota	Kota	- Orang	- Orang	-	-	0,00	Disnake
1					antar Kerja	Kerja yang Mendapatkan	Kerja yang Mendapatkan	Makassar	Makassar	· ·	· ·				
					•	Pelatihan Melalui Bimtek dan	Pelatihan Melalui Bimtek dan								
						lain- lain untuk Peningkatan	lain- lain untuk Peningkatan								
						Kompetensi	Kompetensi								
2 2	.07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	Jumlah Tenaga Kerja yang	Kota	Kota	3.500 Orang	3.500 Orang	144.946.400	142.778.400	(2.168.000)	Disnake
1	1	1			, ,	Ditempatkan Melalui Layanan	Ditempatkan Melalui Layanan	Makassar	Makassar	3				(/	
1						AKAD dan AKL	AKAD dan AKL								
12	.07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang	Jumlah Pencari Kerja yang	Kota	Kota	0 Orang	0 Orang	-	-	0,00	Disnake
1-		-			bagi Pencari Kerja	Mendapatkan Penyuluhan dan	Mendapatkan Penyuluhan dan	Makassar	Makassar	g	g			-,	
1					J	Bimbingan Jabatan	Bimbingan Jabatan								
12	.07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Kota	Kota	30 Orang	30 Orang	235.120.000	205.247.600	(29.872.400)	Disnake
ľ		٠.۱			Disabilitas Ketenagakerjaan	Disabilitas yang Mendapatkan	Disabilitas yang Mendapatkan	Makassar	Makassar	00 0.u.ig	55 5.ag	200.120.000	200.2	(20.0.200)	Diomano
						Fasilitasi Layanan ULD	Fasilitasi Layanan ULD								
12	07	n ₄	2 01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	Jumlah Tenaga Kerja yang	Kota	Kota	183 Orang	183 Orang	1.256.217.750	990.590.600	(265.627.150)	Disnake
- -		J-4	2.01	0000	i ondusan Nesempatan Nerja	Diberdayakan Melalui program	Diberdayakan Melalui program	Makassar	Makassar	100 Orang	100 Orang	1.230.217.730	330.330.000	(200.021.100)	District
						Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	ivianasodi	Makassal						
, ,	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga	Jumlah Perizinan LPTKS	Jumlah Perizinan LPTKS	Kota	Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	41.499.200	41.499.200	0,00	Disnake
- -	.07	04	2.02					Makassar	Makassar	о ценирада	о сенирада	41.499.200	41.499.200	0,00	DISHAKE
					(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	yang Terintegrasi	yang Terintegrasi	ivianassal	HIGKGSSGF						
					(LPTKS) dalam 1 (satu) Daeran Kabupaten/Kota										

00 [0.07	041	0.00	0004	Daniel Da	Lundah Badahan I BTKO	Lundah Barinia and BEKO	17-4-	17-4-	0.1	0.1	44 400 000	44 400 000	0.00	Discolusion
02	2.07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang		Kota Makassar	Kota Makassar	6 Lembaga	6 Lembaga	41.499.200	41.499.200	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.02		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terintegrasi Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang	Terintegrasi Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Lembaga	0 Lembaga	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Berlaku Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Berlaku Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	Kota Makassar	8.000 Orang	8.000 Orang	489.322.000	104.094.800	(385.227.200)	Disnaker
02	2.07	04	2.03		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	60.328.000	60.328.000	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	Kota Makassar	8.000 Orang	8.000 Orang	43.766.800	43.766.800	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	500 Orang	500 Orang	385.227.200	-	(385.227.200)	Disnaker
02	2.07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Orang	40 Orang	222.076.000	222.076.000	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.04		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	Kota . Makassar	40 Orang	. 40 Orang	222.076.000	222.076.000	0,00-	Disnaker
02	2.07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Kota Makassar	Kota Makassar	38,50 Persen	38,50 Persen	8.039.200.400	7.101.705.100	(937.495.300)	Disnaker
							- Angka Sengketa Perusahaan- Pekerja Pertahun			3,66 Persen	3,66 Persen				
						Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)			79,00 Persen	79,00 Persen				
02	2.07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	105 Perusahaan	105 Perusahaan	51.223.300	47.893.300	(3.330.000)	Disnaker
02	2.07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Perusahaan	100 Perusahaan	1.024.800	1.024.800	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.01		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Perusahaan	5 Perusahaan	868.700	868.700	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.01		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	49.329.800	45.999.800	(3.330.000)	Disnaker

			2.02	Perseilsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	260 Perkara	260 Perkara	7.987.977.100	7.053.811.800	(934.165.300)	Disnaker
				Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	Kota Makassar	60 Perkara	60 Perkara	77.126.300	77.126.300	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Perkara	200 Perkara	198.663.600	198.663.600	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.861.200	9.861.200	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Lembaga	2 Lembaga	250.299.300	250.299.300	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	35.782 Orang	35.782 Orang	7.452.026.700	6.517.861.400	(934.165.300)	Disnaker

BAB IV Penutup

4.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2024. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat langsung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjana sumber daya manusia yana berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Kota Makassar tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2024, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
- 2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus mulai dari tahapan ditingkatkan, perencanaan sampai sehingga pelaksanaan pembangunan, diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasilhasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- 3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Kebijakan Makassar, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
- 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
- 3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
- 4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.

Makassar, Agustus 2024 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Panakat: Pembina Utama Muda/IVc

: 19651210 199112 2 006

LAMPIRAN